

Katalog : 3303003.33



PROFIL
TEMPAT
TINGGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

2020



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH



PROFIL
TEMPAT
TINGGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

2020

PROFIL TEMPAT TINGGAL PROVINSI JAWA TENGAH 2020

ISSN : 2407-3431
No. Publikasi : 33520.2103
Katalog : 3303003.33
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 75 halaman

Naskah :

Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah

Penyunting :

Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah

Design Kover oleh:

Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com ; www.flaticon.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2020 merupakan salah satu topik penyajian hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang disajikan mencakup kondisi dan fasilitas tempat tinggal di Jawa Tengah tahun 2020.

Publikasi ini menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk sampai wilayah kabupaten/kota sehingga dapat melihat perbandingan kondisi tempat tinggal antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data dapat lebih memahami informasi yang disajikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, April 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Sentot Bangun Widoyono, M.A

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Sumber Data	5
2.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	5
2.3 Konsep dan Definisi	6
INFOGRAFIS KONDISI FISIK BANGUNAN	13
BAB III KONDISI FISIK BANGUNAN	15
3.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	15
3.2 Jenis Atap Terluas.....	18
3.3 Jenis Dinding Terluas	21
3.4 Jenis dan Luas Lantai	23
INFOGRAFIS FASILITAS PERUMAHAN	27
BAB IV FASILITAS BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	29
4.1 Air Minum	29
4.1.1 Sumber Air MInum	30
4.1.2 Jarak Sumber Air MInum dengan Penampungan Akhir Kotoran.....	32
4.2 Sumber Penerangan	33
4.3 Fasilitas Buang Air Besar	35
4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	36
4.3.2 Penggunaan Kloset	39

INFOGRAFIS KESEHATAN LINGKUNGAN	43
BAB V KESEHATAN LINGKUNGAN	45
5.1 Akses Air Minum Layak	45
5.2 Akses Sanitasi Layak	47
5.3 Bahan Bakar Memasak.....	48
LAMPIRAN	51
CATATAN <i>SAMPLING ERROR</i>	71
DAFTAR PUSTAKA	75

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020	53
Tabel 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020	54
Tabel 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020	56
Tabel 3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020	57
Tabel 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai per Kapita (m ²) Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020	59
Tabel 4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama yang Digunakan untuk Minum dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020	30
Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum, Provinsi Jawa Tengah, 2020	60
Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Kabupaten/Kota, Daerah Tempat Tinggal dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, Provinsi Jawa Tengah, 2020	62

		Halaman
Tabel 4.4	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama, Provinsi Jawa Tengah, 2020	63
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan serta Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, Provinsi Jawa Tengah, 2020.....	64
Tabel 4.6	Persentase Rumah Tangga*) yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, Provinsi Jawa Tengah, 2020.....	66
Tabel 4.7	Persentase Rumah Tangga*) Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Provinsi Jawa Tengah, 2020	67
Tabel 5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, Akses Air Minum Layak, dan Akses Sanitasi Layak, Provinsi Jawa Tengah, 2020	68
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama yang Digunakan untuk Memasak, Provinsi Jawa Tengah, 2020	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri, Provinsi Jawa Tengah, 2018- 2020	16
Gambar 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020	17
Gambar 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020	19
Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020	20
Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Dinding Terluas berupa Tembok Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2020	21
Gambar 3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020	22
Gambar 3.7 Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas berupa Tanah atau Lainnya Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2020	23
Gambar 3.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas, Provinsi Jawa Tengah, 2020	24
Gambar 3.9 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai Per Kapita Kurang atau Sama dengan 7,2 Meter Persegi Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020	26

	Halaman
Gambar 4.1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung dan Mata Air Tak Terlindung Menurut Tipe Daerah dan Jarak ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Terdekat, Provinsi Jawa Tengah, 2020 32
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2020 33
Gambar 4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020 34
Gambar 4.4	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020 36
Gambar 4.5	Persentase Rumah Tangga yang Tidak memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2020 37
Gambar 4.6	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Kabupaten/-Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2020 38
Gambar 4.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020 40
Gambar 4.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020..... 41

Halaman

Gambar5.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018-2020	46
Gambar 5.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018-2020	48
Gambar 5.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020	49

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak pada banyak aspek, salah satunya pada cara menjalani kehidupan. Dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19, banyak negara di dunia mengambil kebijakan pengurangan mobilitas penduduk. Salah satu caranya dengan mengurangi aktivitas di tempat kerja, sekolah, dan tempat ibadah. Masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.

Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, miliaran orang di dunia “dipaksa” untuk lebih banyak menjalani kehidupan di rumah saja agar aman dan terhindar dari virus Corona jenis baru ini. Selain beraktivitas dari rumah, masyarakat juga diminta untuk selalu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkup pribadi dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa tetap sehat dan produktif.

Perubahan yang disebabkan pandemi Covid-19 ini kembali menegaskan akan kebutuhan rumah dan lingkungan yang sehat sebagai tempat hidup dan beraktivitas. Dalam situasi pandemi, rumah dan lingkungan yang sehat menjadi salah satu benteng pertahanan agar masyarakat terhindar dari virus baru ini. Sebagai respons dari kebutuhan itu, rumah sepatutnya tidak hanya dibangun dan disediakan dengan hanya mempertimbangkan pemenuhan syarat bangunan fisik semata. Aspek infrastruktur dasar yang melengkapinya seperti air bersih dan sanitasi serta kesehatan lingkungannya juga perlu menjadi pertimbangan utama.

Kebutuhan akan informasi terkait kondisi rumah dan lingkungan menjadi semakin penting di masa pandemi ini karena dapat memberikan pengetahuan terkait situasi perumahan dan lingkungan yang ditempati masyarakat; apakah sudah

cukup sehat atau perlu ditingkatkan. Publikasi ini mengulas beberapa aspek terkait rumah dan lingkungan.

Selain rumah yang sehat, di atas sudah disinggung mengenai kebutuhan akan lingkungan yang sehat. Jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda, kesatuan keduanya dalam mendukung kehidupan yang lebih berkualitas sebenarnya telah disadari. Dokumen perencanaan nasional maupun agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menempatkan rumah dan lingkungan sehat sebagai tujuan pembangunan. TPB bahkan memuatnya dalam 3 (tiga) tujuan, yaitu Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan Tujuan 11 (Komunitas dan Perkotaan yang Berkelanjutan). Dalam lingkup nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga memuat target rumah layak huni mencapai 70 persen pada tahun 2024. Adapun untuk akses terhadap air minum layak ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun yang sama.

1.2 Tujuan

Publikasi Profil Tempat Provinsi Tinggal Jawa Tengah 2020 disusun guna menyajikan berbagai indikator perumahan sekaligus menggambarkan capaian pembangunan kesehatan lingkungan di Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk pemerintah daerah khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan. Selain itu, publikasi ini juga diharapkan sebagai bahan perencanaan bagi pihak non pemerintah, seperti pihak swasta pengembang perumahan.

1.3 Ruang Lingkup

Indikator yang dimuat dan diulas dalam publikasi ini meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungan. Data disajikan dalam beberapa disagregasi guna memperkaya informasi yang disajikan, antara lain tipe daerah dan jenis kelamin kepala rumah tangga.

Dalam Bab 3 mengulas kondisi fisik bangunan tempat tinggal rumah tangga di Indonesia. Bangunan fisik yang sehat setidaknya dapat dilihat dari jenis atap, lantai, dan dindingnya. Sementara Bab 4 melengkapi publikasi ini dengan mengulas fasilitas perumahan yang mendukung rumah sehat, yaitu sumber air minum, sumber penerangan, dan fasilitas tempat buang air besar (BAB) termasuk kloset yang digunakan rumah tangga. Ulasan pada Bab 3 dan 4 dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tempat tinggal rumah tangga di Indonesia yang disajikan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020.

Kondisi kesehatan lingkungan diulas pada Bab 5, yang dilihat dari akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan bahan bakar utama untuk memasak. Ulasan pada bab ini ditujukan agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi tempat tinggal dan lingkungan tempat tinggal rumah tangga di Indonesia. Data pada bab ini juga disajikan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020.

<https://jateng.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Publikasi Profil Tempat Tinggal Jawa Tengah 2020 disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyediaan informasi capaian indikator perumahan dan kesehatan lingkungan, serta dalam upaya mendukung tercapainya target-target nasional serta global terkait perumahan dan kesehatan lingkungan. Dalam situasi terkini, yaitu pandemi Covid-19, data dan informasi yang dimuat dan diulas dalam publikasi ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam penilaian kualitas tempat tinggal masyarakat.

Sumber data yang digunakan pada publikasi ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikumpulkan pada bulan Maret tahun 2018, 2019, dan 2020. Jumlah sampel yang dicakup dalam Susenas Maret tahun 2020 sebanyak 27.520 rumah tangga yang meliputi wilayah perkotaan dan perdesaan dan tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Susenas juga merupakan sumber data dalam penyediaan indikator lain dalam rangka perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, indikator perumahan dan kesehatan lingkungan dalam publikasi ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

2.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam Susenas, data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka antara petugas pengumpul data dengan responden menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Untuk pertanyaan yang ditujukan kepada individu, pencacah mengusahakan untuk mewawancarai individu yang bersangkutan. Keterangan mengenai rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara kepada kepala rumah tangga, pasangan kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

Seluruh tahapan pengolahan data Susenas dilakukan menggunakan komputer yang meliputi perekaman data, pemeriksaan konsistensi antar-isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi. Sebelumnya, dilakukan tahapan prakomputer yang meliputi pengecekan awal kelengkapan isian kuesioner, penyuntingan terhadap isian tidak wajar, termasuk konsistensi antar-isian jawaban. Definisi operasional yang digunakan disajikan lengkap dalam Penjelasan Teknis.

2.3 Konsep dan Definisi

Mengingat data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas, maka konsep dan definisi dalam publikasi ini pun menggunakan konsep dan definisi Susenas, yaitu:

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal

- Milik sendiri

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditinggali rumah tangga pada waktu pencacahan.

Status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan rumah yang ditinggali oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri

- Kontrak/sewa

Kontrak adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bebas sewa | <p>rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus-menerus tanpa batasan waktu tertentu.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dinas | <p>Status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lainnya | <p>Status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak</p> <p>Misalnya rumah adat</p> |

Atap

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Beton | <p>Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Pada bangunan bertingkat, atap adalah bagian teratas dari bangunan tersebut</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Genteng | <p>Atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Asbes | <p>Atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau <i>fiber/polycarbonate</i>.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Seng | <p>Atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Seng | <p>Atap yang terbuat dari bahan seng, baik yang berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk juga genteng seng yang lazim disebut <i>decrabond</i> (seng yang dilapisi <i>epoxy</i> dan <i>acrylic</i>). <i>Garvalum</i> juga termasuk dalam kategori ini.</p> |

- Bambu | Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya.
- Kayu/sirap | Atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.
- Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia | Atap yang terbuat dari serat pohon aren/enu atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam
- Lainnya | Jenis atap selain yang tersebut di atas, misalnya kardus, kaca, dll.

Dinding

- Sisi luar atau batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka bahan/jenis dinding terluas adalah bahan/jenis dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil)
- Tembok | Dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan bata merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1-1,5 meter
 - Plesteran anyaman bambu/kawat | Dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
 - Kayu/papan | Bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang, atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Tripleks termasuk dalam kategori ini
 - Anyaman Bambu | Bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

• Batang Kayu	Batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu
• Bambu	Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya.
• Lainnya	Jenis dinding selain yang tersebut di atas seperti seng, kardus, dsb
Lantai	Bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.
Luas lantai	<p>Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen), dan ruangan khusus untuk usaha, misalnya warung. Luas lantai bangunan bertingkat adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.</p> <p>Bila satu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.</p> <p>Taman yang memiliki atap menyatu dengan atap rumah (berada di dalam rumah) maupun taman yang berada di samping rumah, namun berada di bawah atap rumah dan merupakan satu kesatuan struktur maka taman dihitung luas lantainya.</p>

Sumber air minum

	<p>Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika rumah tangga menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga</p>
<ul style="list-style-type: none">• Air kemasan bermerk	<p>Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, 19 liter) dan kemasan gelas;</p>
<ul style="list-style-type: none">• Air isi ulang	<p>Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merk</p>
<ul style="list-style-type: none">• Leding	<p>Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Sumur bor/pompa	<p>Air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek)</p>
<ul style="list-style-type: none">• Sumur terlindung	<p>Sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Sumur tak terlindung	<p>Sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Mata air terlindung	<p>Sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Mata air tak terlindung	<p>Sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci dan lainnya</p>
<ul style="list-style-type: none">• Air permukaan	<p>Air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi</p>

- Air hujan | Air yang berasal dari hujan
- Lainnya | Misalnya air laut yang disuling

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

KONDISI FISIK BANGUNAN



99,95 persen
rumah tangga
menggunakan listrik
sebagai sumber
penerangan

82,97 persen
rumah tangga
menggunakan dinding
tembok pada rumahnya

86,97 persen
rumah tangga memilih
genteng sebagai bahan atap
terluas untuk tempat
tinggalnya



90,00 persen
rumah tangga mempunyai
rumah berlantai selain
tanah

89,20 persen
rumah tangga menempati rumah
milik sendiri

40,08 persen
rumah tangga memilih
sumur terlindung/bor/pompa
sebagai sumber air minum

<https://jateng.bps.go.id>

BAB III

KONDISI FISIK BANGUNAN

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari pernyataan ini terlihat bahwa bertempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Pemenuhan kebutuhan bertempat tinggal wajib dilindungi oleh negara melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Dalam RPJMN 2020-2024, ditargetkan pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70 persen. Upaya ini merupakan salah satu strategi yang dirancang untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang merupakan salah 1 (satu) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan.

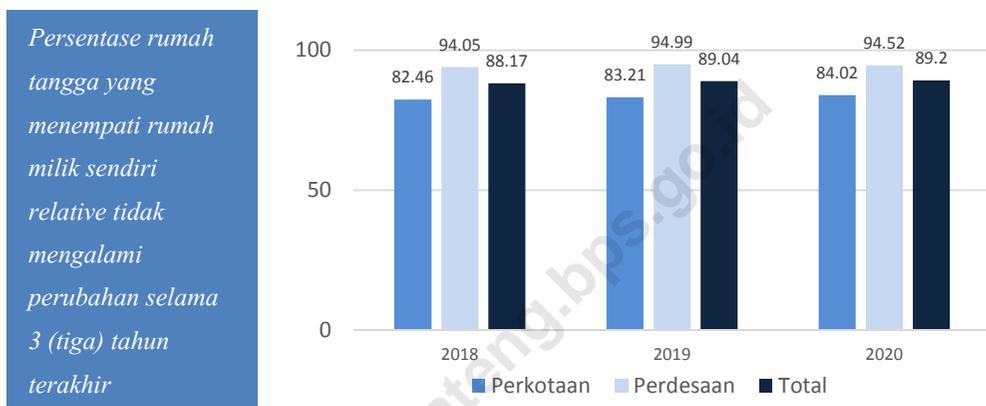
Informasi mengenai kepemilikan bangunan tempat tinggal, jenis atap, dinding, lantai serta luas lantai per kapita juga disajikan pada bab ini. Kondisi fisik dan kualitas bangunan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar penghuninya dapat hidup layak dan nyaman.

3.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Memiliki tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia. Idealnya setiap keluarga dapat menempati rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri.

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal antar individu tidak sama, utamanya berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Mereka yang berpenghasilan tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki tempat tinggal dengan kondisi dan kualitas yang baik, berbeda dengan mereka yang berpenghasilan lebih rendah, atau bahkan rumah tangga miskin.

Gambar 3.1
Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri, Provinsi Jawa Tengah, 2018 - 2020



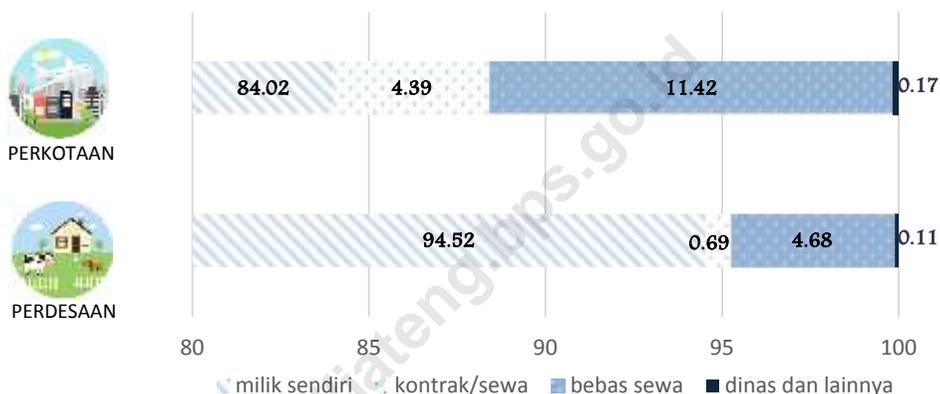
Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Terdapat 5 (lima) status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati dalam Susenas, yakni milik sendiri, sewa atau kontrak, bebas sewa, dinas, dan lainnya. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri relatif tidak mengalami perubahan (Gambar 2.1), terdapat sekitar 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri di daerah perkotaan (84,02 persen) lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan (94,52 persen).

Menurut hasil Susenas 2020, Selain menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, banyak rumah tangga di daerah perkotaan menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/menyewa. Sebanyak 4 dari 100 rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/menyewa di daerah perkotaan (Gambar 3.2.). Seperti yang telah diketahui, daerah perkotaan umumnya merupakan daerah tujuan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan untuk melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan. Banyak di antara

mereka yang akhirnya tinggal di perkotaan dengan mengontrak/menyewa rumah. Ditambah dengan harga tanah dan rumah di daerah perkotaan yang jauh lebih mahal, umumnya membuat rumah tangga kesulitan untuk dapat memiliki rumah/bangunan tempat tinggal sendiri. Meski demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menemukan penyebab tingginya persentase penduduk yang menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/menyewa di daerah perkotaan.

Gambar 3.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Selain menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, banyak rumah tangga di daerah perkotaan menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/menyewa. Sebanyak 4 dari 100 rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/menyewa di daerah perkotaan (Gambar 3.2). Demikian halnya dengan status kepemilikan rumah bebas sewa. Besarnya persentase rumah tangga di daerah perkotaan yang menempati tempat tinggal dengan status bebas sewa, tercatat sebesar 11,42 persen, berbeda signifikan dengan daerah perdesaan dengan status penguasaan tempat tinggal yang sama.

Seperti yang telah diketahui, daerah perkotaan umumnya merupakan daerah tujuan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan untuk melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan. Banyak di antara mereka yang akhirnya tinggal di perkotaan dengan mengontrak/menyewa rumah. Ditambah dengan harga tanah dan rumah di daerah perkotaan yang jauh lebih mahal, umumnya membuat

rumah tangga kesulitan untuk dapat memiliki rumah/bangunan tempat tinggal sendiri. Meski demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menemukan penyebab tingginya persentase penduduk yang menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/menyewa maupun bebas sewa di daerah perkotaan.

Tabel 3.1 pada lampiran memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri di wilayah kota lebih sedikit dari pada wilayah kabupaten, yaitu: Kota Surakarta (56,82 persen), Kota Magelang (61,64 persen), Kota Tegal (66,55 persen), Kota Salatiga (70,57 persen), Kota Pekalongan (74,59 persen) dan Kota Semarang (74,63 persen). Apabila dibandingkan dengan wilayah kabupaten, persentase rumah tangga dengan status bangunan tempat tinggal milik sendiri terbesar antara lain: Kabupaten Wonogiri (97,42 persen), Kabupaten Grobogan (96,20 persen) dan Kabupaten Temanggung (95,75 persen).

Sebaliknya, persentase rumah tangga dengan status tempat tinggal kontrak/sewa terbanyak terdapat di wilayah kota, yaitu Kota Surakarta (19,83 persen), Kota Magelang (19,18 persen), Kota Salatiga (17,13 persen) serta Kota Semarang (9,31 persen). Demikian halnya dengan rumah tangga dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal bebas sewa (milik orang tua, keluarga, teman) persentase terbesar terdapat di Kota Tegal yaitu mencapai 29,37 persen dari total rumah tangga dan Kota surakarta sebesar 23,07 persen.

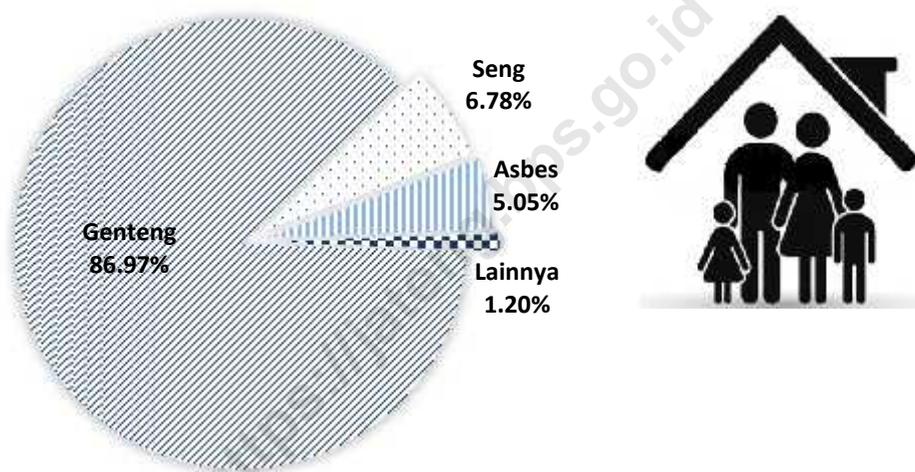
3.2 Jenis Atap Terluas

Atap merupakan salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal mengingat fungsinya sebagai pelindung bagi penghuni secara langsung dari cuaca yang tidak diinginkan atau kerusakan yang disebabkan oleh siraman air hujan, terpaan sinar matahari, dan tiupan angin. Oleh karena itu, disamping perancangan dan pemasangan struktur atap yang baik dan kokoh, pemilihan jenis material bahan atap juga menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan tempat tinggal. Biasanya dipilih dari bahan yang mampu memberi perlindungan optimal, kuat, ringan dan kedap air.

Atap tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga karena pemilihan jenis atap juga menyesuaikan dengan kondisi geografis

suatu wilayah. Di daerah dataran rendah, biasanya rumah tinggal memakai atap jenis genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas dalam rumah, sedangkan untuk daerah dataran tinggi, biasanya jenis atap seng banyak dipakai agar panas matahari yang diterima dapat disimpan sehingga dapat menghangatkan bagian dalam rumah. Dalam Susenas Maret terdapat beberapa jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas, yaitu beton, genteng, seng, asbes, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya

Gambar 3.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Jenis atap genteng/seng/asbes masih menjadi pilihan utama penduduk dalam pembuatan tempat tinggal. Hasil Susenas 2020 menunjukkan bahwa sekitar 86 dari 100 rumah tangga di Jawa Tengah menggunakan genteng sebagai bahan bangunan utama atap rumah terluas (Gambar 3.3). Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas yang paling banyak digunakan selanjutnya adalah seng (6,78 persen), dan asbes (5,05 persen).

Berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, persentase penggunaan seng sebagai jenis atap terluas bangunan tempat tinggal di daerah pedesaan (8,02 persen) lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (5,57 persen). Sebaliknya, persentase penggunaan asbes lebih banyak di daerah perkotaan, sekitar 6,10

persen, dibandingkan di daerah perdesaan yang mencapai 3,97 persen dari total rumah tangga di Jawa Tengah (Gambar 3.4).

Masih banyaknya rumah tangga di Indonesia yang tinggal di rumah dengan jenis atap terluas berupa asbes perlu mendapat perhatian mengingat material asbes bersifat karsinogenik. WHO (2018) menyebutkan paparan asbes, termasuk *chrysotile* dapat menyebabkan kanker paru-paru, laring, dan ovarium, serta *mesothelioma*. Paparan asbes di rumah dikaitkan sebagai penyebab beberapa ribu kematian setiap tahunnya.

Gambar 3.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Penggunaan atap jenis genteng paling banyak dipakai oleh rumah tangga di Kabupaten Blora (98,72 persen), Kabupaten Wonogiri (98,52 persen), Kabupaten Sragen (98,18 persen). Sedangkan di Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah di Jawa Tengah dengan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah beratap genteng terendah, yaitu masing-masing 41,98 persen dan 42,80 persen (Lampiran, Tabel 3.2).

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih ada rumah tangga yang menggunakan jenis atap jerami/ijuk/daun/rumbia serta jenis atap lainnya. Terdapat sembilan kabupaten/kota yang tercatat menggunakan jenis atap lainnya. Persentase rumah tangga tinggal dalam rumah dengan jenis atap lainnya terbesar antara lain: Kota Surakarta (1,07 persen), Kota Magelang (0,28 persen), Kabupaten Purbalingga

dan Kabupaten Demak (0,22 persen). Sedangkan yang berjenis atap jerami/ijuk/daun/rumbia terdapat di Kabupaten Pematang (0,17 persen)

3.3 Jenis Dinding Terluas

Dinding merupakan salah satu komponen bangunan yang penting untuk diperhatikan. Selain dikarenakan dinding menopang bangunan secara keseluruhan, dinding juga harus memenuhi standar kesehatan. Jenis dinding yang baik adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Dalam Susenas Maret, terdapat 7 (tujuh) jenis bahan bangunan utama dinding rumah, yakni tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, bambu, dan lainnya.

Gambar 3.5
Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Dinding Terluas berupa Tembok Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 - 2020



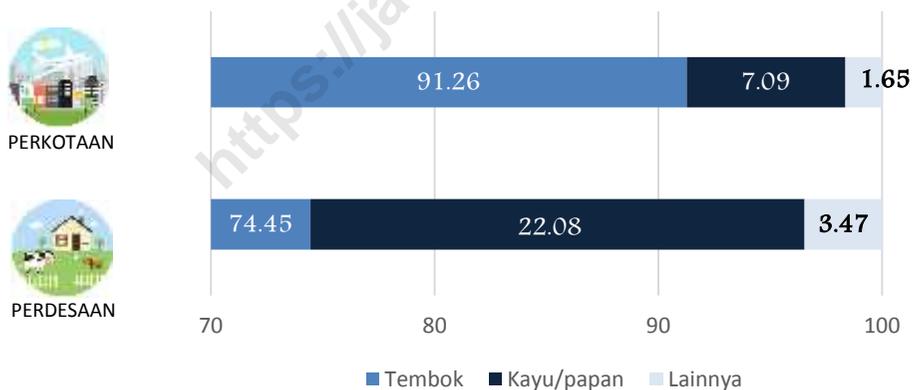
Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan tembok merupakan jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas yang paling banyak digunakan rumah tangga disebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan jika dilihat persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal ber dinding tembok selama tahun 2018 hingga 2020 cenderung meningkat. Gambar 3.5. menunjukkan persentase pada tahun 2018 adalah sebesar 80,07 persen kemudian

naik menjadi 81,39 persen di tahun 2019 dan 82,97 persen pada tahun 2020. Namun demikian masih terdapat sekitar 17,03 persen rumah tangga di Jawa Tengah pada tahun 2020 yang menggunakan dinding selain tembok, sebab tidak menutup kemungkinan pada daerah tertentu masyarakat lebih cenderung memilih dinding berjenis bukan tembok untuk tempat tinggalnya, seperti menggunakan kayu, bambu dan lainnya meskipun dari segi keamanan, jenis dinding tembok lebih memberikan rasa aman dibandingkan jenis dinding bukan tembok.

Apabila dilihat menurut tipe daerah, persentase rumah tangga yang menggunakan tembok sebagai bahan bangunan utama dinding rumah terluas lebih banyak di daerah perkotaan (91,26 persen) dibandingkan daerah perdesaan (74,45 persen). Berbeda halnya dengan dinding jenis kayu, persentase rumah tangga di daerah perdesaan yang tinggal di rumah dengan dinding terluas jenis ini mencapai 22,08 persen, sedangkan di daerah perkotaan hanya sebesar 7,09 persen (Gambar 3.6).

Gambar 3.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Lampiran Tabel 3.3), Kota Tegal dan Kabupaten Kudus memiliki persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan dinding terluas jenis tembok terbesar yaitu masing-masing 99,55 persen dan 98,30 persen. Sebaliknya Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora merupakan wilayah yang memiliki persentase rumah tangga bertempat tinggal dengan dinding terluas tembok yang terendah,

yaitu masing-masing sekitar 23,60 persen dan 24,80 persen. Karena di kedua kabupaten tersebut persentase rumah tangga yang bertempat tinggal dengan dinding terluas menggunakan kayu tercatat paling tinggi di Jawa Tengah yakni 74,74 persen (Kabupaten Grobogan) dan 72,96 persen (Kabupaten Blora). Hal ini dikarenakan masyarakat di kedua kabupaten tersebut lebih menyukai menggunakan kayu sebagai dinding bangunan daripada dinding jenis tembok, selain juga didukung oleh kondisi wilayahnya yang masih relatif banyak hutan penghasil kayu jati.

3.4 Jenis dan Luas Lantai

Selain jenis atap dan jenis dinding, jenis lantai rumah juga perlu diperhatikan karena terkait dengan kesehatan. Rumah dengan lantai berupa tanah juga dianggap sebagai rumah yang tidak layak huni. Dalam Susenas Maret, terdapat beberapa jenis bahan bangunan utama untuk lantai rumah, yaitu marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.

Gambar 3.7
Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas berupa Tanah atau Lainnya Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 - 2020



Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis lantai berupa tanah atau lainnya terus menurun selama 3 (tiga) tahun terakhir

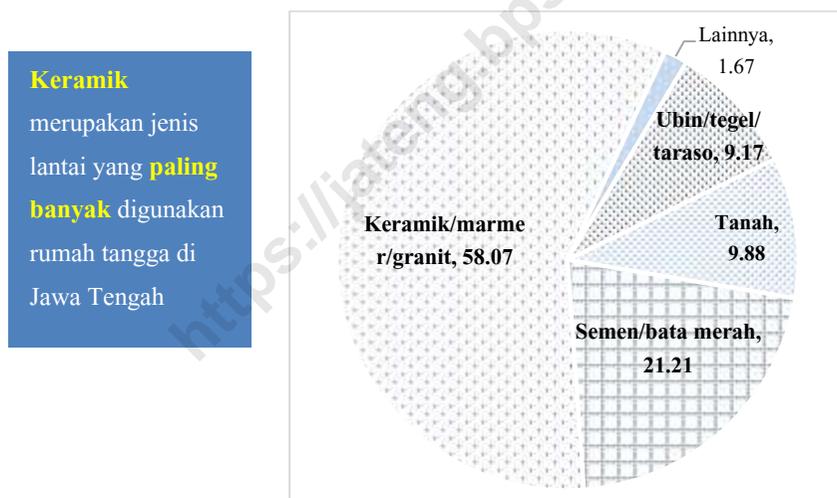
Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Berdasarkan data Susenas Maret tahun 2018 sampai 2020, persentase rumah tangga yang tinggal dengan lantai rumah terluas dari tanah dan lainnya cenderung menurun. Sebagaimana pada Gambar 3.7, persentase pada tahun 2018 sebesar 12,15 persen turun menjadi 10,00 persen di tahun 2020. Penurunan

persentase rumah tangga dengan tempat tinggal lantai tanah dan lainnya selama tahun 2018 sampai 2020 juga terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Di daerah perkotaan sebesar 5,86 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 turun menjadi 5,14 persen. Demikian pula untuk daerah pedesaan, pada tahun 2018 rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis lantai tanah dan lainnya sekitar 18,628 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 14,99 persen. Jenis lantai berupa tanah sering dikaitkan dengan berbagai penyakit. Penelitian Rahayu dan Ramdani (2013) menemukan anak yang tinggal di rumah yang lantainya terbuat dari tanah memiliki kemungkinan 3 (tiga) kali lipat untuk menderita cacangan dibandingkan anak yang tinggal di rumah yang lantainya bukan terbuat dari tanah.

Gambar 3.8
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas,
Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan keramik/marmar/granit sebagai jenis lantai terluas yaitu sebanyak 58,07 persen, berlantai semen/bata merah sekitar 21,21 persen dan 9,17 persen menggunakan ubin/tegel/taraso. Namun demikian masih terdapat sekitar 9,88 persen rumah tangga yang bangunan tempat tinggalnya berlantai tanah. (Gambar 3.8).

Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Semarang, merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga yang bertempat tinggal memakai lantai jenis

marmar/keramik/granit tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yakni masing-masing mencapai 83,16 persen, 78,96 persen dan 77,47 persen. Sebaliknya persentase rumah tangga yang tinggal dalam rumah berlantai terluas jenis marmar/keramik/granit terendah adalah di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora masing-masing hanya sekitar 20,81 persen dan 27,61 persen (Tabel 3.4).

Di sisi lain masih cukup banyak rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan lantai terluas jenis tanah dan lainnya, bahkan hampir separuh dari total rumah tangganya, tercatat persentase terbesar berada di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, masing-masing mencapai 44,65 persen dan 42,33 persen. Demikian halnya untuk wilayah kota, masih terdapat rumah tangga yang tinggal dalam bangunan berlantai tanah dan lainnya, seperti Kota Semarang (2,52 persen), dan Kota Tegal (2,48 persen).

Selain jenis lantai, luas lantai per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan status layak atau tidak layaknya suatu rumah. Luas lantai tempat tinggal seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Secara tidak langsung, luas lantai juga berhubungan dengan sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Luas lantai juga terkait dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangga.

Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai perkapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total anggota rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 Ayat 3 menyatakan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Jika satu bangunan rumah dengan luas lantai ini dihuni oleh 5 orang, maka luas per kapita yang dianjurkan oleh Undang-Undang ini adalah paling tidak sebesar 7,2 meter persegi. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di

Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Gambar 3.9
Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita Kurang atau Sama dengan 7,2 Meter Persegi Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018-2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Pada tahun 2020, sekitar 1,56 persen dari total rumah tangga di Jawa Tengah menempati bangunan tempat tinggal dengan luas perkapita 7,2 meter persegi, terjadi penurunan dibanding tahun 2019 yaitu 2,38 persen. Apabila dilihat menurut tipe daerah, persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi jauh lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di daerah perdesaan, yaitu 2,98 persen berbanding 0,68 persen.

Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Grobogan merupakan tiga kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal dengan luas lantai perkapita lebih dari 10 m² terbesar, yaitu masing-masing sebesar 99,64 persen, 99,30 persen dan 98,5 persen. Namun demikian masih terdapat rumah tangga yang menghuni tempat tinggal dengan luas lantai kurang dari atau sama dengan 7,2 m², dengan persentase terbesar berada di Kota Surakarta yaitu sekitar 14,45 persen, Kota Magelang (6,97 persen) dan Kota Tegal (6,41 persen) (Tabel 3.5). Hal ini diduga rumah tangga tersebut menempati tempat tinggal dengan status kontrak/sewa.

FASILITAS PERUMAHAN



99,95 persen RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN LISTRIK



26,95 persen RUMAH TANGGA MINUM DARI KEMASAN BERMEREK/ AIR ISI ULANG



94,94 persen RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN FASILITAS BUANG AIR BESAR SENDIRI DAN BERSAMA



97,09 persen RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN KLOSET LEHER ANGSA



<https://jateng.bps.go.id>

BAB IV

FASILITAS BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

Secara harfiah rumah merupakan bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia, oleh karena itu rumah sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mempunyai banyak pengaruh, seperti pengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan anggota rumah tangga yang menempati rumah tersebut atau bisa juga pengaruh terhadap status sosial ekonomi. Karena hal tersebut maka diperlukan rumah yang ideal yakni rumah yang memiliki sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut ini akan dibahas fasilitas-fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah air minum/air bersih, sumber penerangan, dan fasilitas buang air besar.

4.1 Air Minum

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar paling penting bagi seluruh makhluk hidup. Pada manusia, lebih dari 60 persen dari berat tubuhnya merupakan air. Secara umum, seorang pria dewasa membutuhkan sekitar 3 (tiga) liter air minum per hari, sementara pada wanita dewasa membutuhkan sekitar 2,2 liter air minum per hari. Selain untuk minum, manusia juga membutuhkan air untuk aktivitas mandi, mencuci, dan sebagainya. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia akan air minum, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492/MENKES/PER/IV/2000 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum mengatur standar kesehatan dari air yang diminum, yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

4.1.1 Sumber Air Minum

Perbedaan akses rumah tangga terhadap air minum berakibat munculnya variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga. Susenas Maret 2019 mencakup variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga seperti air kemasan bermerk, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun hal ini belum dapat diwujudkan, data tahun 2020 menunjukkan sebagian besar masyarakat masih mengonsumsi air yang diperoleh secara swadaya baik dengan cara membeli maupun tidak.

Tabel 4.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama yang Digunakan untuk Minum dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Minum Kemasan Bermerk/Isi Ulang	32,01	21,75	26,95
Leding	21,06	11,95	16,56
Sumur Bor/Pompa	22,45	18,80	20,65
Sumur Terlindung	18,29	20,61	19,43
Sumur tak terlindung	1,39	2,75	2,06
Mata air terlindung/tak terlindung	4,61	22,82	13,59
Air permukaan, air hujan dan lainnya	0,19	1,32	0,74
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sumber air minum yang berasal dari air isi ulang merupakan jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga yaitu sebesar 26,95 persen. Sisanya yaitu sekitar 20,65 persen menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber utama air minum, 19,43 persen menggunakan air dari sumur terlindung dan

16,56 persen menggunakan air leding. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa masih adanya rumah tangga yang menggunakan air permukaan, air hujan dan lainnya sebagai sumber utama air minum, yaitu sebesar 0,74 persen.

Sementara jika dilihat berdasarkan tipe daerah terdapat perbedaan, di daerah perkotaan sumber air minum utama yang banyak digunakan adalah air isi ulang (32,01 persen), sedangkan di daerah perdesaan rumah tangga paling banyak menggunakan sumber air utama dari mata air terlindung/tak terlindung (22,82 persen). Masyarakat perkotaan lebih memilih menggunakan air minum isi ulang karena efek dari budaya instan, praktis dan mudah mendapatkannya, selain itu masyarakat perkotaan beranggapan bahwa air minum isi ulang biasanya menggunakan mesin isi ulang yang melalui proses filterisasi sehingga air lebih bersih dan higienis dibandingkan air yang berasal dari tanah yang kemungkinan sudah tercemar jika di daerah perkotaan. Faktanya, air minum isi ulang itu cenderung tidak baik untuk kesehatan. Hal ini dikarenakan air tersebut rentan mendapat pencemaran dari kuman atau bakteri meskipun banyak penyedia air minum isi ulang mengklaim jika airnya sudah disterilisasi dan menggunakan teknologi penyaringan yang terkini. Selain itu, umumnya depo pengisian air minum isi ulang berada di pinggir jalan yang tentu akan beresiko terkena polusi, debu, dan berbagai bakteri dengan mudah. Pemerintah harus memikirkan mengenai solusi pengganti air minum isi ulang yang lebih sehat untuk masyarakat. Sebaliknya, masyarakat perdesaan yang belum terlalu terkena dampak budaya instan lebih memilih sumber air minum dari sumur terlindung. Selain itu, kemungkinan air tanah tercemar di perdesaan masih sangat kecil.

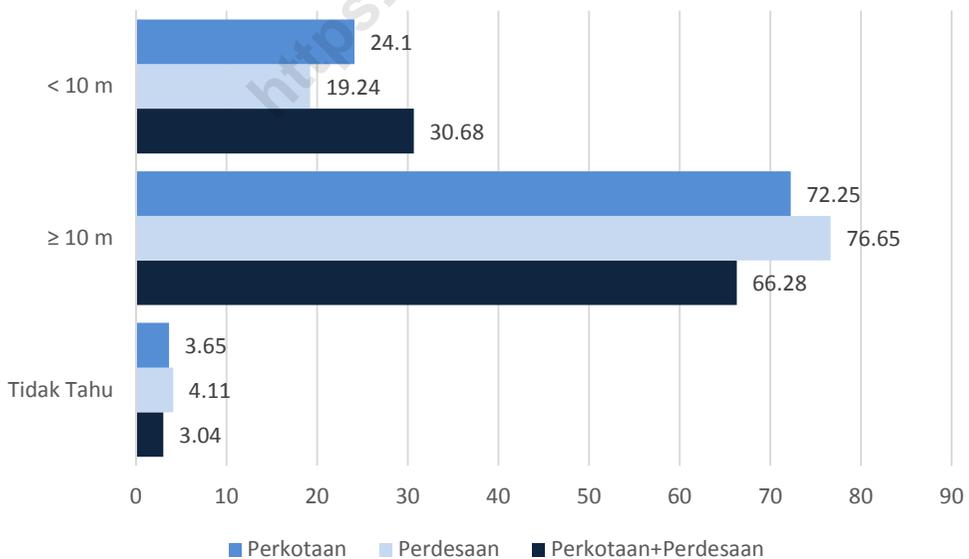
Kabupaten Grobogan merupakan wilayah di Jawa Tengah dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum yaitu sebesar 69,96 persen (Tabel 4.2). Sebaliknya, Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah dengan persentase terendah yakni hanya 0,63 persen rumah tangga yang menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber air minum utama. Perbedaan persentase antara keduanya tergolong tinggi yaitu lebih dari 50 persen. Hal menarik lainnya adalah bahwa ada 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah dimana masih ada rumah tangga yang mengkonsumsi air permukaan sebagai sumber air minum utama. Rumah tangga di 9 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah

menggunakan air hujan sebagai sumber air minum utama, serta rumah tangga di 7 kabupaten/kota yang tercatat mengkonsumsi air lainnya sebagai sumber air minum utama.

4.1.2 Jarak Sumber Air Minum dengan Penampungan Akhir Kotoran

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Kementerian Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa sekitar 69,86 persen rumah tangga sudah memiliki sumber air minum yang berjarak 10 meter atau lebih, dari tempat penampungan tinja terdekat. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan tinja mencapai 5,28 persen.

Gambar 4.1
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Tipe Daerah dan Jarak ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Terdekat, Provinsi Jawa Tengah, 2020

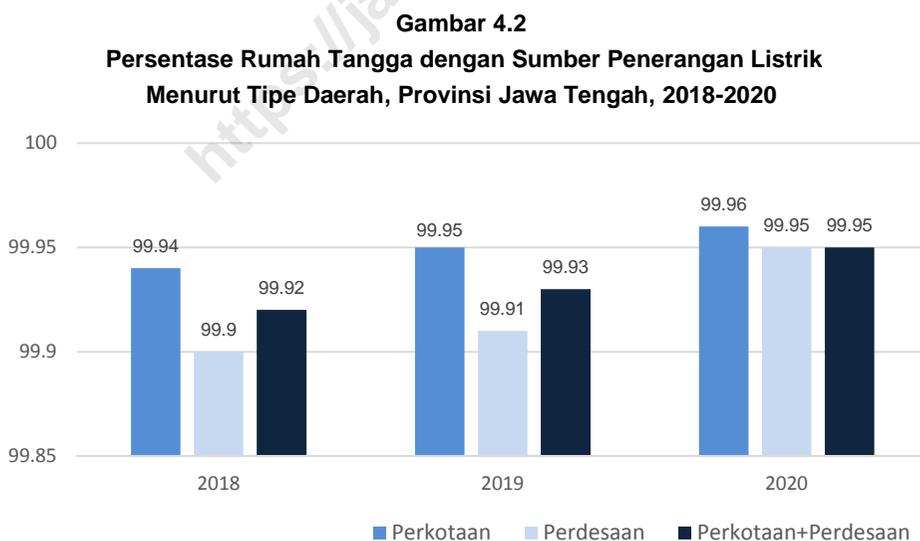


Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

4.2 Sumber Penerangan

Dalam konteks rumah sebagai tempat tinggal, sumber penerangan yang digunakan merupakan salah satu fasilitas yang mengindikasikan kelayakan tempat tinggal tersebut. Rumah yang baik harus memiliki fasilitas penerangan yang cukup. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktivitas. Pada siang hari umumnya masyarakat memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan. Namun bila di malam hari, masyarakat menggunakan beberapa alternatif sumber penerangan seperti listrik, petromak dan obor.

Susenas Maret 2020 memberikan informasi rumah tangga menurut sumber utama penerangan rumah tangga, yang dibedakan menjadi listrik PLN (dengan dan tanpa meteran), listrik non-PLN seperti sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN) dan pembangkit listrik tenaga air (yang tidak dikelola oleh PLN), dan bukan listrik seperti petromak/lampu aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya. Data ini dapat memberikan informasi tingkat keterjangkauan listrik tiap daerah dan juga dapat dilihat menurut tipe daerah perkotaan dan perdesaan.

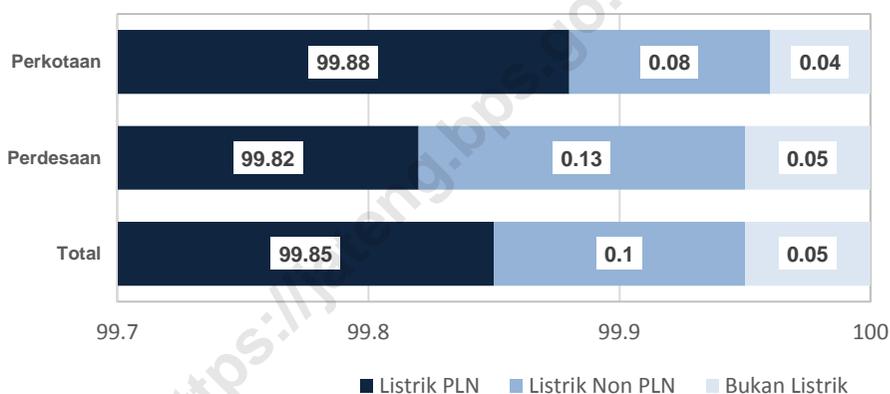


Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Seiring perkembangan jaman, listrik semakin menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swadaya

sendiri. Gambar 4.2 menunjukkan persentase rumah tangga menurut sumber utama penerangan dan tipe daerah di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 berdasarkan hasil Susenas Maret. Terlihat bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama di rumah mengalami peningkatan sampai tahun 2020. Dari Gambar 4.2 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik pada tahun 2020 sebesar 99,95 persen, sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar 99,93 persen dan tahun 2018 sebesar 99,92 persen.

Gambar 4.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama
Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Secara umum, persentase rumah tangga yang sumber utama penerangannya adalah listrik PLN (baik dengan maupun tanpa meteran) di wilayah perkotaan telah mencapai 99,88 persen atau hampir seluruh rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan telah menggunakan listrik PLN dan sekitar 0,08 persen menggunakan listrik non PLN sebagai sumber penerangan. Meski demikian masih ada sekitar 0,04 persen rumah tangga di perkotaan yang belum menikmati fasilitas listrik.

Sumber penerangan listrik juga sudah menyebar sampai ke pelosok perdesaan. Sekitar 99,82 persen rumah tangga di daerah perdesaan di Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan listrik PLN sebagai sumber penerangan, sekitar 0,13 persen menggunakan listrik non PLN dan 0,05 persen menggunakan bukan listrik.

(Gambar 4.3). Ke depannya pemerintah melalui PLN perlu melakukan upaya-upaya percepatan akses listrik PLN bagi rumah tangga di perdesaan supaya lebih banyak rumah tangga di perdesaan yang dapat menikmati listrik.

Data Susenas Maret 2020 juga menunjukkan bahwa hampir 100 persen rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Bahkan di 11 (sebelas) kabupaten/kota semua rumah tangga sudah menikmati listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Namun demikian, masih ada 9 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan utama bukan listrik seperti di Kabupaten Batang yang merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik terbesar di Jawa Tengah, yaitu mencapai 0,55 persen. Bahkan di Kota Pekalongan dan Kota Tegal masih terdapat rumah tangga yang sumber penerangan utamanya menggunakan bukan listrik, jumlahnya masing-masing mencapai 0,17 persen dan 0,13 persen rumah tangga (Tabel 4.3).

4.3 Fasilitas Buang Air Besar

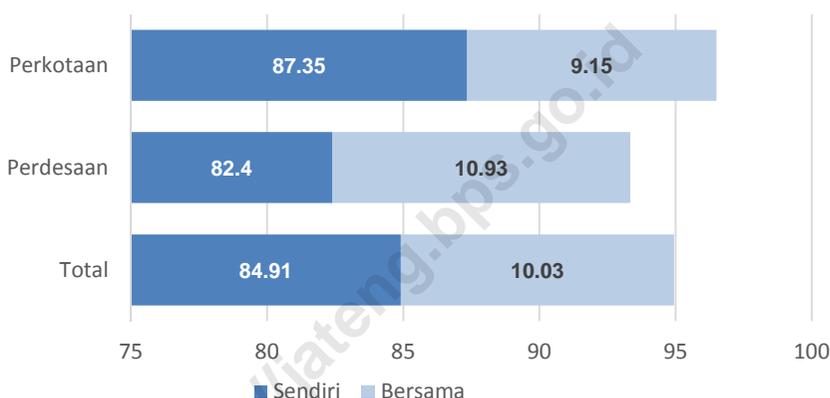
Selain sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran (jamban) merupakan fasilitas sanitasi lain yang semestinya terdapat dalam rumah. Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar yang tidak sehat merupakan salah satu faktor risiko penyebaran penyakit khususnya *water borne disease* yaitu penyakit yang disebabkan oleh kontak dengan air yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Kontaminasi bakteri *EColi* yang umumnya ada pada feses terhadap air minum akan berkurang jika fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh masyarakat sudah dikategorikan sehat. Fasilitas tempat buang air besar yang sehat itu memperhatikan penggunaan fasilitas buang air besar, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir tinja. Rumah tangga juga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa terjaga kebersihannya.

4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar yang sehat memperhatikan jumlah pengguna dari fasilitas tersebut, semakin sedikit jumlah pengguna akan semakin baik. Susenas

Maret 2020 membagi kriteria penggunaan menjadi penggunaan sendiri, bersama, umum, ada fasilitas tetapi tidak digunakan, dan tidak ada fasilitas buang air besar. Kriteria yang memenuhi fasilitas buang air besar yang layak yaitu yang digunakan sendiri dan bersama. Penggunaan sendiri adalah hanya rumah tangga tersebut yang menggunakan, sementara penggunaan bersama adalah hanya digunakan oleh rumah tangga tersebut bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

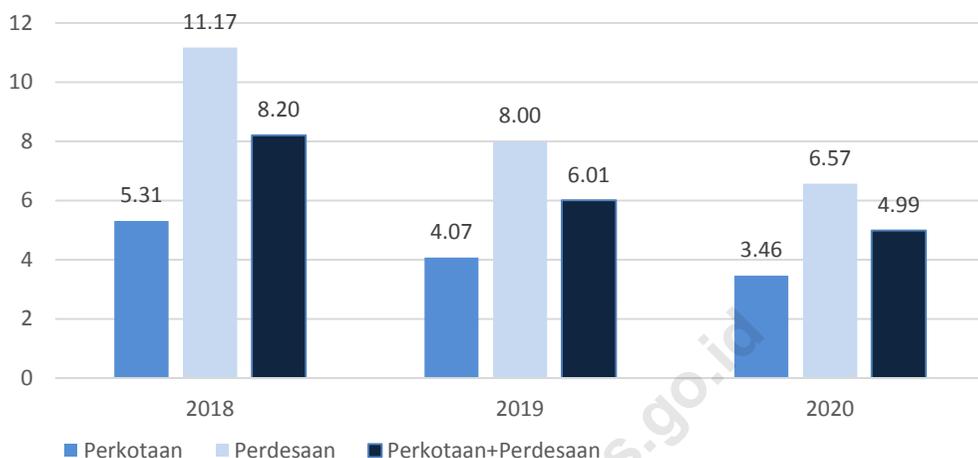
Gambar 4.4
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Gambar 4.4 memberikan informasi bahwa pada tahun 2020 rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dan bersama sebesar 94,94 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri dan bersama di daerah perkotaan lebih tinggi (96,50 persen) dibandingkan dengan daerah perdesaan (93,33 persen). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah perkotaan lebih memperhatikan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar bagi rumah tangganya.

Gambar 4.5
Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut
Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 - 2020



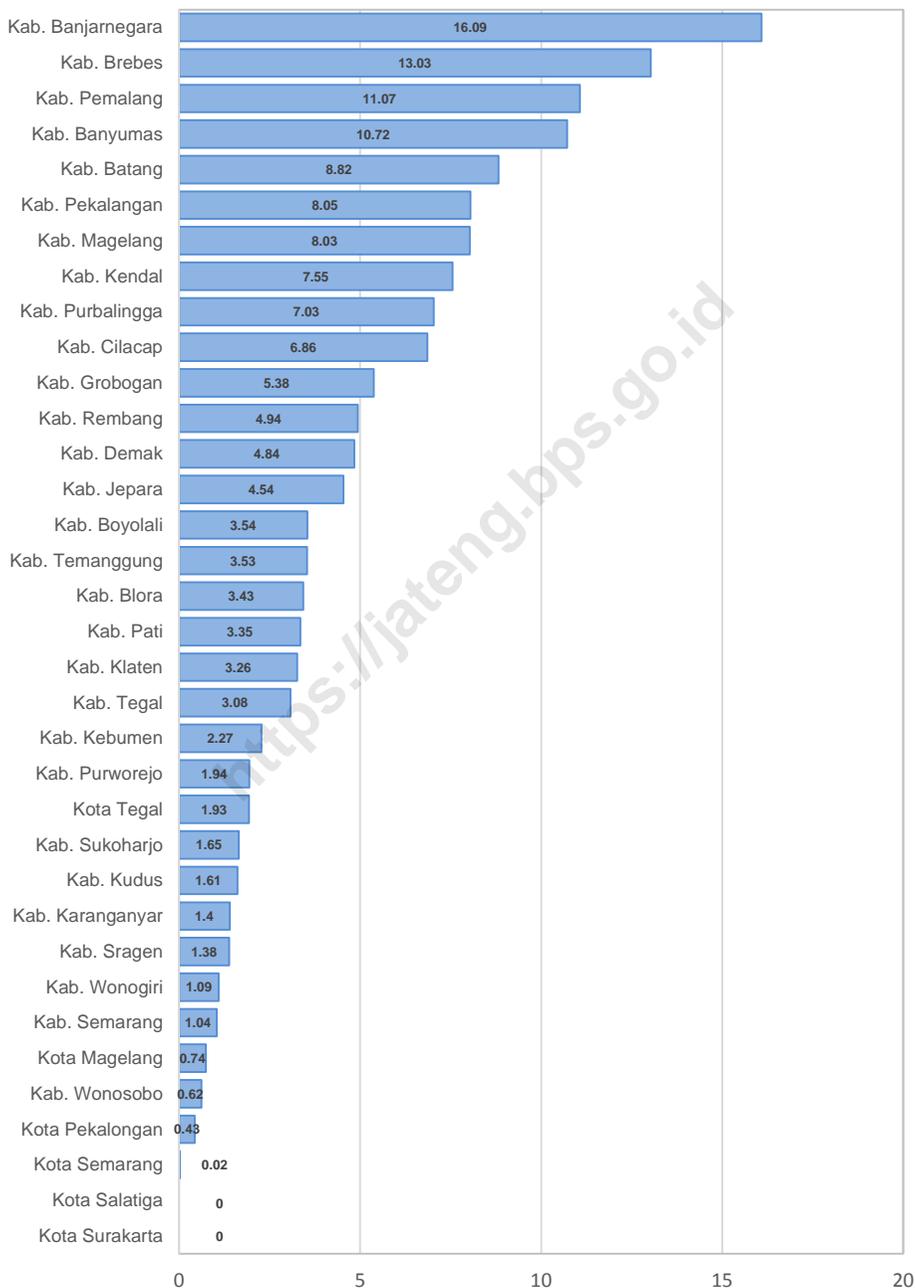
Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 masih ditemukan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar yaitu sebanyak 4,99 persen. Rumah tangga di perdesaan yang tidak terdapat fasilitas buang air besar lebih tinggi dari pada di perkotaan, tercatat 6,57 persen dibanding 3,46 persen. Hal ini mengindikasikan masih belum meratanya ketersediaan fasilitas buang air besar untuk rumah tangga, khususnya di daerah perdesaan yang kemungkinan masih buang air besar langsung di kebun, sungai, sawah, dan tempat tertentu lainnya. Meski demikian terjadi penurunan persentase dari tahun 2018 ke tahun 2020 (Gambar 4.5).

Rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang merupakan kabupaten dengan persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tertinggi, masing-masing tercatat sebesar 16,09 persen, 13,03 persen dan 11,07 persen. Sedangkan Kota Salatiga dan Kota Surakarta merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah dimana seluruh rumah tangganya menggunakan fasilitas buang air besar. (Gambar 4.6).

Gambar 4.6

Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Masih adanya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa jamban patut mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan masalah kesehatan penghuni rumah maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kotoran yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebarkan oleh vektor penyakit seperti lalat maupun serangga lain. Disamping itu, perilaku membuang kotoran secara sembarangan juga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya akibat bau yang ditimbulkannya.

4.3.2 Penggunaan Kloset

Salah satu kriteria fasilitas buang air besar yang sehat terlihat dari jenis kloset yang digunakan. Syarat kloset yang baik yaitu merupakan tempat penyimpanan feces yang baik, kuat, mudah dibersihkan, berbentuk leher angsa atau menggunakan tutup yang mudah diangkat sehingga meminimalisir pemindahan kuman penyakit dari feces ke inang baru melalui perantara air ataupun serangga.

Penggunaan kloset oleh rumah tangga di Jawa Tengah bervariasi. Dalam Susenas, jenis kloset dirinci menjadi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, dan cemplung/cubluk. Pertanyaan mengenai jenis kloset yang digunakan hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dan penggunaannya sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Kloset leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti diantaranya menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulnya bau, tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat, serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa dari rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama sebanyak 96,31 persen sudah menggunakan kloset jenis leher angsa. Namun demikian masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis kloset plengsengan (1,35 persen), dan cemplung/cubluk (2,34 persen). Hal ini berarti bahwa mayoritas rumah tangga di Jawa Tengah dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama sudah menggunakan kloset yang memenuhi syarat kesehatan.

Gambar 4.7
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah,
Provinsi Jawa Tengah, 2020



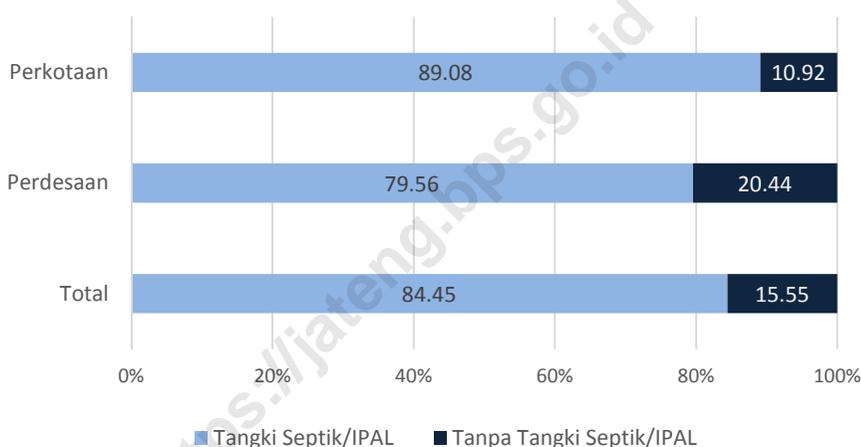
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Di kabupaten/kota di Jawa Tengah pada umumnya rumah tangga sudah menggunakan jenis kloset leher angsa. Di Kota Salatiga sudah mencapai 99,84 persen, dan Kabupaten Karanganyar 99,78 persen rumah tangga yang menggunakan kloset jenis leher angsa (Lampiran Tabel 4.5). Bahkan di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Pekalongan semua rumah tangganya menggunakan kloset leher angsa.

Kriteria pendukung fasilitas buang air besar yang sehat juga termasuk Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT). Sama halnya dengan jenis kloset yang digunakan, pertanyaan terkait TPAT pada Susenas hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dan penggunaannya sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Pilihan TPAT yang digunakan pada Susenas yaitu tangki septik, IPAL, kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah,

pantai/tanah lapang/kebun, serta lainnya. Dari beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja, Tangki Septik ataupun IPAL merupakan tempat pembuangan yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja. Tempat pembuangan akhir tinja di tempat terbuka rentan menjadi penyebab penyakit, khususnya jika dalam tinja terkandung kuman penyakit, seperti disentri, selain juga mengurangi estetika lingkungan.

Gambar 4.8
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020

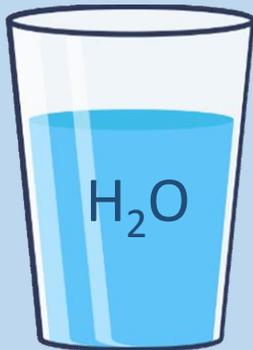


Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama yang belum menggunakan TPAT berupa tangki septik atau SPAL sebanyak 15,55 persen. Dengan kata lain, rumah tangga ini sudah memiliki TPAT, namun belum memenuhi syarat kesehatan. Persentase rumah tangga semacam ini di perkotaan sekitar 10,92 persen sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 20,44 persen (Gambar 4.8). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan standar kesehatan dari sisi TPAT.

<https://jateng.bps.go.id>

KESEHATAN LINGKUNGAN



94,07 persen

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak

83,24 persen

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak



12,35 persen

Rumah tangga menggunakan kayu bakar sebagai bahan utama untuk memasak



<https://jateng.bps.go.id>

BAB V

KESEHATAN LINGKUNGAN

Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan didefinisikan sebagai upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi: air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

Selain disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, isu kesehatan lingkungan ini juga menjadi salah satu pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia. TPB terkait kesehatan lingkungan dikelompokkan ke dalam Pilar Pembangunan Lingkungan yang terdiri atas 6 tujuan, yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif; Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

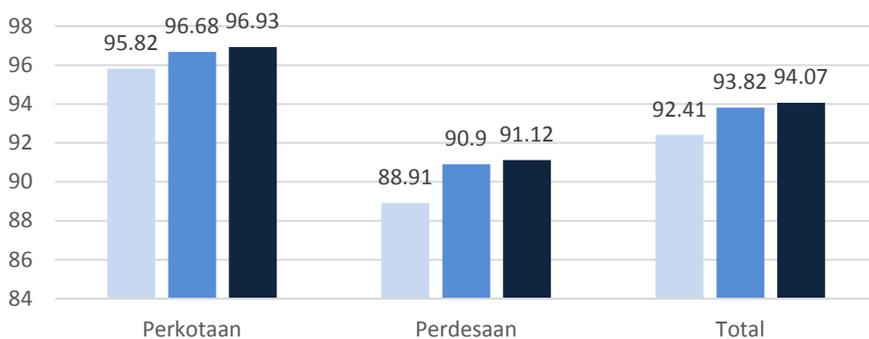
5.1 Akses Air Minum Layak

Akses terhadap air minum yang aman dan layak merupakan elemen penting dalam mewujudkan kehidupan yang sehat. TPB Tujuan 6 Target 6.1 yaitu, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030 telah memasukkan akses terhadap air minum aman sebagai

salah satu sarannya. Sejalan dengan itu, RPJMN 2020-2024 juga menargetkan pencapaian akses air minum layak menyeluruh di Indonesia dan peningkatan kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) untuk menyediakan air layak pada masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2020a).

Klasifikasi air minum aman terdiri dari beberapa tingkatan pencapaian akses antara lain bersumber dari air minum layak, mudah diakses, tersedia setiap saat ketika dibutuhkan, dan memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis air minum. Menggunakan data Susenas Maret, penghitungan indikator air minum layak untuk memantau target TPB maupun RPJMN terus mengalami perkembangan. Mulai tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan menggunakan air minum layak jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Begitu pula ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang namun sumber utama untuk mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan (BPS, 2019). Perbedaan klasifikasi ini dengan yang sebelumnya adalah tidak lagi memasukkan karakteristik jarak ke tempat pembuangan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Gambar 5.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 - 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2020 sebesar 94,07 persen. Tren 3 (tiga) tahun sejak tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan peningkatan pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 1,66 persen. Sementara itu, peningkatan di perdesaan (2,21 persen) sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perkotaan (1,11 persen).

5.2 Akses Sanitasi Layak

Penggunaan sanitasi layak juga merupakan komponen penting dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang tinggi. Pentingnya sanitasi sehat membuat indikator sanitasi layak dalam populasi juga menjadi salah satu sasaran dalam TPB Tujuan 6. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak merupakan indikator yang digunakan untuk memantau Target 6.2 yaitu, pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka.

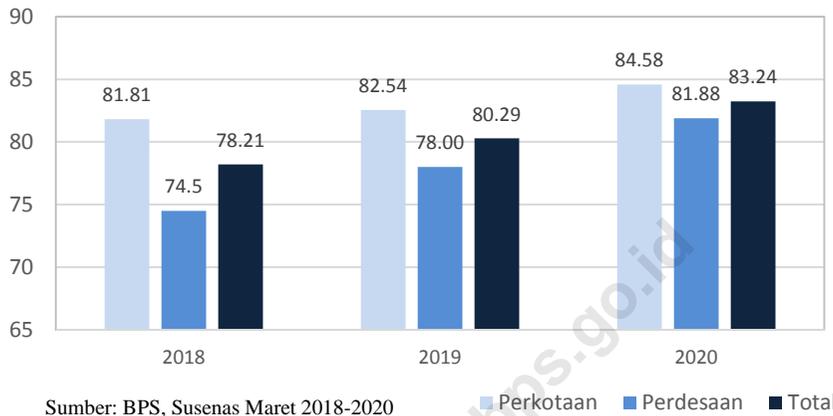
Fasilitas sanitasi rumah tangga diklasifikasikan layak, jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang digunakan hanya oleh ART sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan MCK komunal. Seperti halnya klasifikasi air minum layak, indikator ini juga mengalami pengembangan di tahun 2019. Pada pengembangan tersebut, termasuk pula klasifikasi sanitasi layak khusus pada rumah tangga yang tinggal di perdesaan, jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama rumah tangga lain dengan jenis kloset leher angsa namun tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan lubang tanah (BPS, 2019).

Kriteria selanjutnya adalah jenis kloset yang digunakan berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan sebesar 5,03 poin. Peningkatan persentase rumah tangga yang

memiliki akses terhadap sanitasi layak dalam 3 (tiga) tahun terakhir jauh lebih tinggi di perdesaan (7,38 poin) dibandingkan dengan perkotaan (2,77 poin).

Gambar 5.2

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 - 2020

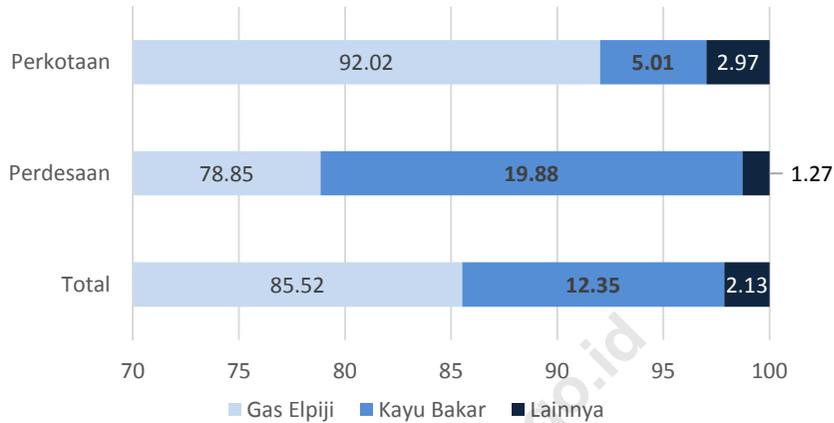


5.3 Bahan Bakar Memasak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan menyebutkan bahwa kualitas lingkungan yang sehat identik dengan pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang meliputi lingkungan air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, dan serta vektor binatang pembawa penyakit. Pasal 18 dalam peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu persyaratan kesehatan udara dalam ruang adalah udara terhindar dari paparan asap berupa asap rokok, asap dapur, dan asap dari sumber bergerak lainnya. Berkaitan dengan isu kesehatan lingkungan tersebut, salah satu target dalam TPB Tujuan ke-7 adalah akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Pada tahun 2020 gas elpiji merupakan sumber bahan bakar utama untuk memasak terbesar dari seluruh rumah tangga di Jawa Tengah yaitu mencapai 85,52 persen. Namun demikian, penggunaan kayu bakar sebagai bahan utama untuk memasak juga menunjukkan *share* yang cukup tinggi yaitu, 12,35 persen dari total rumah tangga di Jawa Tengah (Gambar 5.3).

Gambar 5.3
Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Gambar 5.3 menunjukkan jika persentase penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak jauh lebih tinggi di daerah perdesaan (19,88 persen) jika dibandingkan dengan di perkotaan (5,01 persen). Dwiprabowo (2010) dalam penelitiannya di perdesaan Pulau Jawa menyebutkan bahwa banyaknya penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak di perdesaan berhubungan dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk yang ada di sektor pertanian sehingga mudah dalam mendapatkan kayu bakar. Selain itu, harga yang murah juga merupakan salah satu alasan penggunaan bahan bakar kayu walaupun sebagian besar rumah tangga juga memiliki gas elpiji.

<https://jateng.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://jatengbps.go.id>

Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah 2020

Kabupaten/Kota	Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas sewa	Dinas	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Cilacap	92,13	1,84	5,29	0,74	0,00	100,00
Kab. Banyumas	89,59	3,21	7,20	0,00	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	93,45	2,12	4,43	0,00	0,00	100,00
Kab. Banjarnegara	92,87	0,43	6,70	0,00	0,00	100,00
Kab. Kebumen	94,47	1,35	4,18	0,00	0,00	100,00
Kab. Purworejo	87,17	2,68	10,15	0,00	0,00	100,00
Kab. Wonosobo	94,72	1,35	3,75	0,18	0,00	100,00
Kab. Magelang	92,98	2,11	4,81	0,10	0,00	100,00
Kab. Boyolali	94,04	1,01	4,95	0,00	0,00	100,00
Kab. Klaten	84,69	1,99	13,32	0,00	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	77,59	6,32	15,80	0,29	0,00	100,00
Kab. Wonogiri	97,42	0,25	2,33	0,00	0,00	100,00
Kab. Karanganyar	91,67	0,86	6,42	1,05	0,00	100,00
Kab. Sragen	92,29	0,40	7,31	0,00	0,00	100,00
Kab. Grobogan	96,20	0,34	3,46	0,00	0,00	100,00
Kab. Blora	93,14	1,00	5,86	0,00	0,00	100,00
Kab. Rembang	95,31	0,53	4,16	0,00	0,00	100,00
Kab. Pati	94,45	0,98	4,57	0,00	0,00	100,00
Kab. Kudus	91,18	2,42	6,19	0,21	0,00	100,00
Kab. Jepara	91,21	0,85	7,60	0,34	0,00	100,00
Kab. Demak	94,92	0,99	4,09	0,00	0,00	100,00
Kab. Semarang	90,08	4,74	4,91	0,27	0,00	100,00
Kab. Temanggung	95,75	1,27	2,98	0,00	0,00	100,00
Kab. Kendal	89,84	1,19	8,93	0,04	0,00	100,00
Kab. Batang	95,56	0,56	3,13	0,75	0,00	100,00
Kab. Pekalongan	86,53	3,20	10,27	0,00	0,00	100,00
Kab. Pemalang	85,94	1,27	12,79	0,00	0,00	100,00
Kab. Tegal	82,97	1,42	15,61	0,00	0,00	100,00
Kab. Brebes	90,74	0,98	8,19	0,09	0,00	100,00
Kota Magelang	61,64	19,18	18,27	0,91	0,00	100,00
Kota Surakarta	56,82	19,83	23,07	0,28	0,00	100,00
Kota Salatiga	70,57	17,13	12,18	0,12	0,00	100,00
Kota Semarang	74,63	9,31	16,01	0,05	0,00	100,00
Kota Pekalongan	74,59	6,54	18,47	0,40	0,00	100,00
Kota Tegal	66,55	3,99	29,37	0,09	0,00	100,00
Jawa Tengah	89,20	2,56	8,10	0,14	0,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempal Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Beton	Genteng	Asbes	Seng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	1,39	74,44	19,10	4,99
Kab. Banyumas	0,33	66,91	9,89	22,87
Kab. Purbalingga	0,58	42,80	8,23	47,75
Kab. Banjarnegara	0,74	78,51	3,65	17,10
Kab. Kebumen	1,04	90,77	4,74	2,87
Kab. Purworejo	0,70	92,91	4,61	1,78
Kab. Wonosobo	2,08	41,98	5,41	50,53
Kab. Magelang	2,14	92,79	3,24	1,83
Kab. Boyolali	0,51	97,80	1,31	0,12
Kab. Klaten	0,95	97,02	0,64	0,78
Kab. Sukoharjo	1,55	96,96	0,65	0,72
Kab. Wonogiri	0,14	98,52	0,59	0,52
Kab. Karanganyar	1,79	91,16	0,16	6,40
Kab. Sragen	0,81	98,18	0,37	0,31
Kab. Grobogan	0,66	97,59	0,84	0,69
Kab. Blora	0,00	98,72	0,66	0,43
Kab. Rembang	0,46	97,74	1,29	0,36
Kab. Pati	0,50	97,62	1,32	0,56
Kab. Kudus	2,09	96,76	0,54	0,49
Kab. Jepara	0,52	97,94	1,30	0,11
Kab. Demak	1,29	92,90	4,84	0,63
Kab. Semarang	2,12	88,02	8,05	1,57
Kab. Temanggung	2,98	88,75	2,27	6,00
Kab. Kendal	0,38	95,75	2,36	1,51
Kab. Batang	0,23	82,14	2,01	15,56
Kab. Pekalongan	0,00	89,29	2,38	8,33
Kab. Pemalang	0,60	74,70	1,43	23,10
Kab. Tegal	0,41	90,31	3,74	5,54
Kab. Brebes	0,41	95,28	2,25	2,06
Kota Magelang	3,22	82,29	8,03	5,37
Kota Surakarta	4,19	88,26	4,58	1,79
Kota Salatiga	2,92	90,32	5,03	1,74
Kota Semarang	1,74	69,13	26,20	2,93
Kota Pekalongan	0,87	97,13	1,84	0,00
Kota Tegal	0,27	92,40	6,65	0,69
Jawa Tengah	1,03	86,97	5,05	6,78

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3.2 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Bambu/Kayu/ Sirap	Jerami/ Ijuk/ Daun/ Rumbia	Lain-nya	Jumlah
(1)	(6)	(7)	(8)	(10)
Kab. Cilacap	0,08	0,00	0,00	100,00
Kab. Banyumas	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	0,42	0,00	0,22	100,00
Kab. Banjarnegara	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Kebumen	0,58	0,00	0,00	100,00
Kab. Purworejo	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Wonosobo	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Magelang	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Boyolali	0,26	0,00	0,00	100,00
Kab. Klaten	0,61	0,00	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	0,00	0,00	0,12	100,00
Kab. Wonogiri	0,23	0,00	0,00	100,00
Kab. Karanganyar	0,40	0,00	0,09	100,00
Kab. Sragen	0,33	0,00	0,00	100,00
Kab. Grobogan	0,22	0,00	0,00	100,00
Kab. Blora	0,19	0,00	0,00	100,00
Kab. Rembang	0,15	0,00	0,00	100,00
Kab. Pati	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Kudus	0,00	0,00	0,12	100,00
Kab. Jepara	0,13	0,00	0,00	100,00
Kab. Demak	0,12	0,00	0,22	100,00
Kab. Semarang	0,17	0,00	0,07	100,00
Kab. Temanggung	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Kendal	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Batang	0,06	0,00	0,00	100,00
Kab. Pekalongan	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Pemalang	0,00	0,17	0,00	100,00
Kab. Tegal	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Brebes	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Magelang	0,81	0,00	0,28	100,00
Kota Surakarta	0,11	0,00	1,07	100,00
Kota Salatiga	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Semarang	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Pekalongan	0,00	0,00	0,16	100,00
Kota Tegal	0,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Tengah	0,13	0,01	0,04	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Tembok	Plesteran anyaman bambu/kawat	Kayu/Batang kayu	Bambu/Anyaman bambu	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
Kab. Cilacap	83,21	0,33	8,38	6,47	1,61	100,00
Kab. Banyumas	78,93	1,29	15,68	2,51	1,59	100,00
Kab. Purbalingga	90,49	0,59	6,33	1,58	1,01	100,00
Kab. Banjarnegara	88,48	0,00	10,98	0,54	0,00	100,00
Kab. Kebumen	92,48	0,15	3,86	1,30	2,21	100,00
Kab. Purworejo	88,84	0,00	6,87	3,09	1,20	100,00
Kab. Wonosobo	79,98	0,13	19,73	0,00	0,16	100,00
Kab. Magelang	91,06	0,19	6,27	2,09	0,39	100,00
Kab. Boyolali	80,41	0,21	16,15	2,15	1,08	100,00
Kab. Klaten	97,83	0,50	0,78	0,89	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	95,53	0,33	1,13	1,18	1,83	100,00
Kab. Wonogiri	84,27	0,81	13,53	0,78	0,61	100,00
Kab. Karanganyar	97,25	0,53	1,00	0,96	0,26	100,00
Kab. Sragen	71,84	0,64	24,00	2,58	0,94	100,00
Kab. Grobogan	23,60	0,28	74,74	1,06	0,32	100,00
Kab. Blora	24,80	0,51	72,96	1,29	0,44	100,00
Kab. Rembang	66,90	1,84	26,82	3,40	1,04	100,00
Kab. Pati	84,26	0,19	12,70	2,66	0,19	100,00
Kab. Kudus	98,30	0,17	0,87	0,66	0,00	100,00
Kab. Jepara	91,68	0,11	6,83	0,54	0,84	100,00
Kab. Demak	67,54	0,27	31,22	0,93	0,04	100,00
Kab. Semarang	86,70	0,18	12,83	0,29	0,00	100,00
Kab. Temanggung	89,26	0,34	7,86	0,27	2,27	100,00
Kab. Kendal	65,39	0,30	34,09	0,22	0,00	100,00
Kab. Batang	82,84	0,00	16,17	0,30	0,69	100,00
Kab. Pekalongan	95,33	0,26	4,02	0,39	0,00	100,00
Kab. Pemalang	90,33	0,21	6,98	2,25	0,23	100,00
Kab. Tegal	94,55	0,16	3,67	1,62	0,00	100,00
Kab. Brebes	92,71	0,00	3,84	3,11	0,34	100,00
Kota Magelang	93,97	0,00	5,30	0,00	0,73	100,00
Kota Surakarta	94,61	0,79	4,25	0,11	0,24	100,00
Kota Salatiga	95,34	0,00	4,41	0,00	0,25	100,00
Kota Semarang	95,85	0,25	3,90	0,00	0,00	100,00
Kota Pekalongan	97,19	0,16	2,37	0,00	0,28	100,00
Kota Tegal	99,55	0,17	0,14	0,14	0,00	100,00
Jawa Tengah	82,97	0,35	14,49	1,57	0,62	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Marmar/ granit	Keramik	Parket *)	Kayu/ papan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	2,10	64,43	10,79	0,27
Kab. Banyumas	1,40	59,91	11,53	0,74
Kab. Purbalingga	1,37	64,10	9,18	0,23
Kab. Banjarnegara	1,88	56,51	7,70	0,00
Kab. Kebumen	1,12	56,28	8,86	0,00
Kab. Purworejo	0,27	47,15	16,74	0,59
Kab. Wonosobo	1,09	42,01	4,77	0,00
Kab. Magelang	0,48	45,60	8,88	1,08
Kab. Boyolali	1,20	44,00	9,67	1,14
Kab. Klaten	0,73	50,76	15,88	2,42
Kab. Sukoharjo	0,99	59,80	12,31	0,47
Kab. Wonogiri	2,04	46,47	22,34	0,69
Kab. Karanganyar	1,51	61,47	9,82	0,79
Kab. Sragen	2,56	40,86	11,29	0,94
Kab. Grobogan	0,97	19,84	6,86	7,93
Kab. Blora	0,56	27,05	3,86	3,36
Kab. Rembang	2,15	47,87	6,81	0,85
Kab. Pati	3,62	61,83	5,91	0,25
Kab. Kudus	1,82	71,93	8,60	0,00
Kab. Jepara	1,02	64,77	8,07	0,55
Kab. Demak	3,07	46,25	3,87	6,81
Kab. Semarang	0,72	58,60	5,41	1,13
Kab. Temanggung	0,92	48,28	9,05	0,00
Kab. Kendal	2,35	49,86	10,44	0,39
Kab. Batang	4,23	63,21	7,83	0,04
Kab. Pekalongan	2,59	74,88	5,85	0,14
Kab. Pemasang	3,31	63,02	9,75	0,67
Kab. Tegal	2,80	69,62	9,89	0,15
Kab. Brebes	2,83	64,88	10,92	0,41
Kota Magelang	1,24	61,34	8,61	1,26
Kota Surakarta	1,51	67,64	15,52	0,25
Kota Salatiga	0,74	69,86	5,71	0,08
Kota Semarang	1,85	75,62	6,61	0,39
Kota Pekalongan	1,64	81,52	8,81	0,60
Kota Tegal	1,78	77,18	10,53	0,00
Jawa Tengah	1,79	56,28	9,44	1,14

Catatan *) : terdiri dari Parket/Vinil/Permadani/Ubin/Tegel/Teraso

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3.4 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Semen/bata merah	Bambu	Tanah	Lainnya	Jumlah
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Cilacap	14,60	0,58	7,23	0,00	100,00
Kab. Banyumas	20,41	0,00	6,01	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	19,64	0,40	4,84	0,24	100,00
Kab. Banjarnegara	28,18	0,00	5,73	0,00	100,00
Kab. Kebumen	28,04	0,36	5,34	0,00	100,00
Kab. Purworejo	28,77	0,00	6,48	0,00	100,00
Kab. Wonosobo	45,47	0,00	6,66	0,00	100,00
Kab. Magelang	32,03	0,33	11,60	0,00	100,00
Kab. Boyolali	34,37	0,23	9,39	0,00	100,00
Kab. Klaten	27,49	0,09	2,63	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	23,00	0,03	3,40	0,00	100,00
Kab. Wonogiri	22,29	0,00	5,62	0,55	100,00
Kab. Karanganyar	22,85	0,00	3,56	0,00	100,00
Kab. Sragen	29,11	0,39	14,73	0,12	100,00
Kab. Grobogan	19,66	0,09	44,19	0,46	100,00
Kab. Blora	22,78	0,06	42,00	0,33	100,00
Kab. Rembang	16,64	0,36	24,94	0,38	100,00
Kab. Pati	14,97	0,00	13,42	0,00	100,00
Kab. Kudus	13,26	0,00	4,39	0,00	100,00
Kab. Jepara	13,98	0,06	11,37	0,18	100,00
Kab. Demak	31,79	0,49	7,00	0,72	100,00
Kab. Semarang	24,47	0,04	9,63	0,00	100,00
Kab. Temanggung	33,99	0,00	7,76	0,00	100,00
Kab. Kendal	21,45	0,00	15,51	0,00	100,00
Kab. Batang	12,69	0,20	11,80	0,00	100,00
Kab. Pekalongan	11,84	0,13	4,15	0,42	100,00
Kab. Pemalang	15,25	0,00	8,00	0,00	100,00
Kab. Tegal	11,70	0,00	5,84	0,00	100,00
Kab. Brebes	15,03	0,00	5,93	0,00	100,00
Kota Magelang	26,25	0,00	1,30	0,00	100,00
Kota Surakarta	14,36	0,26	0,46	0,00	100,00
Kota Salatiga	21,64	0,00	1,89	0,08	100,00
Kota Semarang	12,74	0,27	2,26	0,26	100,00
Kota Pekalongan	5,74	0,00	1,30	0,39	100,00
Kota Tegal	8,03	0,00	2,48	0,00	100,00
Jawa Tengah	21,21	0,14	9,88	0,12	100,00

Catatan *) : terdiri dari Parket/Vinil/Permadani/Ubun/Tegel/Teraso

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, dan Luas Lantai per Kapita (m²) Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	≤7.2	7.3-9.9	≥10	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	1,56	3,70	94,74	100,00
Kab. Banyumas	0,98	4,15	94,87	100,00
Kab. Purbalingga	1,47	4,89	93,64	100,00
Kab. Banjarnegara	0,73	4,18	95,09	100,00
Kab. Kebumen	1,30	4,80	93,90	100,00
Kab. Purworejo	1,74	4,91	93,35	100,00
Kab. Wonosobo	2,04	4,95	93,01	100,00
Kab. Magelang	2,65	4,45	92,90	100,00
Kab. Boyolali	0,52	1,54	97,94	100,00
Kab. Klaten	0,71	2,49	96,80	100,00
Kab. Sukoharjo	2,28	2,80	94,92	100,00
Kab. Wonogiri	0,28	0,42	99,30	100,00
Kab. Karanganyar	1,14	1,78	97,08	100,00
Kab. Sragen	0,66	1,13	98,21	100,00
Kab. Grobogan	0,38	1,12	98,50	100,00
Kab. Blora	0,11	0,25	99,64	100,00
Kab. Rembang	1,62	4,13	94,25	100,00
Kab. Pati	1,38	4,03	94,59	100,00
Kab. Kudus	1,36	5,02	93,62	100,00
Kab. Jepara	1,80	3,99	94,21	100,00
Kab. Demak	1,61	2,91	95,48	100,00
Kab. Semarang	2,03	5,24	92,73	100,00
Kab. Temanggung	1,89	3,86	94,25	100,00
Kab. Kendal	0,92	2,75	96,33	100,00
Kab. Batang	1,62	2,71	95,67	100,00
Kab. Pekalongan	3,07	5,98	90,95	100,00
Kab. Pemasang	3,22	5,15	91,63	100,00
Kab. Tegal	1,66	2,66	95,68	100,00
Kab. Brebes	3,83	5,68	90,49	100,00
Kota Magelang	6,97	7,67	85,36	100,00
Kota Surakarta	14,45	10,80	74,75	100,00
Kota Salatiga	3,77	10,20	86,03	100,00
Kota Semarang	5,74	6,32	87,94	100,00
Kota Pekalongan	6,13	5,79	88,08	100,00
Kota Tegal	6,41	5,11	88,48	100,00
Jawa Tengah	1,56	3,70	94,74	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Air kemasan bermerk/ isi ulang	Leding	Sumur bor/pompa	Sumur terlindung	Sumur tak terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Cilacap	26,71	10,27	16,85	31,38	1,75
Kab. Banyumas	14,54	8,30	23,25	30,99	2,13
Kab. Purbalingga	6,78	20,60	13,42	37,25	3,43
Kab. Banjarnegara	4,22	5,32	18,79	24,57	3,25
Kab. Kebumen	15,69	4,77	12,66	45,02	4,42
Kab. Purworejo	9,56	8,75	24,11	39,42	4,57
Kab. Wonosobo	0,63	41,28	1,80	2,47	0,07
Kab. Magelang	2,77	19,64	11,29	23,10	3,81
Kab. Boyolali	10,95	11,10	25,47	35,57	2,00
Kab. Klaten	16,89	10,28	28,15	38,96	1,97
Kab. Sukoharjo	34,57	6,25	33,74	20,84	0,53
Kab. Wonogiri	7,95	13,82	32,59	17,83	1,36
Kab. Karanganyar	15,61	27,45	22,50	15,92	0,60
Kab. Sragen	40,68	17,78	18,67	12,96	0,27
Kab. Grobogan	69,96	3,90	12,19	6,09	5,10
Kab. Blora	51,18	1,67	26,49	14,99	3,29
Kab. Rembang	54,11	2,46	26,92	4,79	0,98
Kab. Pati	49,73	15,70	21,87	7,72	1,05
Kab. Kudus	39,19	18,35	21,08	16,67	0,30
Kab. Jepara	20,98	10,79	16,24	33,76	13,18
Kab. Demak	68,08	5,03	23,75	1,24	0,12
Kab. Semarang	14,01	11,75	30,69	17,63	1,00
Kab. Temanggung	2,08	23,62	16,87	9,96	0,21
Kab. Kendal	25,09	28,87	15,06	13,78	1,31
Kab. Batang	3,14	24,53	16,67	30,68	0,93
Kab. Pekalongan	10,27	16,98	31,80	28,70	0,46
Kab. Pemasang	19,93	25,25	31,17	6,17	0,69
Kab. Tegal	17,49	31,18	28,84	16,45	2,25
Kab. Brebes	28,00	25,37	19,71	12,09	0,56
Kota Magelang	15,19	67,75	11,50	3,69	0,00
Kota Surakarta	56,04	19,86	21,16	2,29	0,47
Kota Salatiga	27,99	43,67	12,95	12,82	0,65
Kota Semarang	63,77	17,57	12,95	4,18	0,08
Kota Pekalongan	14,08	38,07	21,18	26,66	0,00
Kota Tegal	6,03	93,80	0,08	0,09	0,00
Jawa Tengah	26,95	16,56	20,65	19,43	2,06

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 4.2 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Mata air terlindung/ tak terlindung	Air permukaan	Air hujan	Lainnya	Jumlah
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kab. Cilacap	10,76	0,00	1,67	0,61	100,00
Kab. Banyumas	19,01	1,78	0,00	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	18,31	0,16	0,05	0,00	100,00
Kab. Banjarnegara	43,85	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Kebumen	16,67	0,64	0,12	0,00	100,00
Kab. Purworejo	13,11	0,48	0,00	0,00	100,00
Kab. Wonosobo	53,60	0,15	0,00	0,00	100,00
Kab. Magelang	39,23	0,00	0,00	0,15	100,00
Kab. Boyolali	14,90	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Klaten	0,19	0,00	3,56	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	4,07	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Wonogiri	24,86	0,23	0,21	1,16	100,00
Kab. Karanganyar	17,54	0,00	0,00	0,39	100,00
Kab. Sragen	9,64	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Grobogan	2,76	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Blora	1,89	0,49	0,00	0,00	100,00
Kab. Rembang	10,33	0,00	0,42	0,00	100,00
Kab. Pati	3,93	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Kudus	3,95	0,00	0,13	0,34	100,00
Kab. Jepara	5,03	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Demak	0,05	0,63	1,11	0,00	100,00
Kab. Semarang	24,92	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Temanggung	46,46	0,80	0,00	0,00	100,00
Kab. Kendal	15,88	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Batang	23,86	0,00	0,00	0,20	100,00
Kab. Pekalongan	11,79	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Pemalang	11,42	2,26	3,04	0,07	100,00
Kab. Tegal	3,80	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Brebes	14,20	0,08	0,00	0,00	100,00
Kota Magelang	1,87	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Surakarta	0,19	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Salatiga	1,92	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Semarang	1,44	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Pekalongan	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Tegal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Tengah	13,59	0,27	0,38	0,09	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Kabupaten/Kota, Daerah Tempat Tinggal dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja			Jumlah
	<10 m	≥10 m	Tidak tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	25,36	73,86	0,78	100,00
Kab. Banyumas	17,50	76,64	5,86	100,00
Kab. Purbalingga	24,44	70,78	4,78	100,00
Kab. Banjarnegara	14,27	83,22	2,51	100,00
Kab. Kebumen	33,45	63,12	3,43	100,00
Kab. Purworejo	21,35	78,10	0,55	100,00
Kab. Wonosobo	6,69	92,77	0,54	100,00
Kab. Magelang	14,45	80,61	4,94	100,00
Kab. Boyolali	22,57	71,98	5,45	100,00
Kab. Klaten	42,91	55,62	1,47	100,00
Kab. Sukoharjo	29,65	68,82	1,53	100,00
Kab. Wonogiri	10,75	87,58	1,67	100,00
Kab. Karanganyar	17,95	79,05	3,00	100,00
Kab. Sragen	15,93	79,02	5,05	100,00
Kab. Grobogan	13,56	83,78	2,66	100,00
Kab. Blora	11,15	88,55	0,30	100,00
Kab. Rembang	11,44	69,58	18,98	100,00
Kab. Pati	43,21	53,84	2,95	100,00
Kab. Kudus	38,96	59,75	1,29	100,00
Kab. Jepara	19,33	76,19	4,48	100,00
Kab. Demak	30,17	58,09	11,74	100,00
Kab. Semarang	16,54	82,59	0,87	100,00
Kab. Temanggung	13,05	82,67	4,28	100,00
Kab. Kendal	15,53	76,05	8,42	100,00
Kab. Batang	31,11	68,54	0,35	100,00
Kab. Pekalongan	32,97	66,19	0,84	100,00
Kab. Pemalang	28,46	65,93	5,61	100,00
Kab. Tegal	42,84	53,59	3,57	100,00
Kab. Brebes	39,10	55,89	5,01	100,00
Kota Magelang	23,14	60,93	15,93	100,00
Kota Surakarta	53,16	44,48	2,36	100,00
Kota Salatiga	24,40	73,52	2,08	100,00
Kota Semarang	13,92	75,47	10,61	100,00
Kota Pekalongan	45,60	52,55	1,85	100,00
Kota Tegal	100,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Tengah	24,10	72,25	3,65	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik non PLN	Selain Listrik	Jumlah
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kab. Cilacap	99,76	0,24	0,00	100,00
Kab. Banyumas	99,92	0,08	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	99,85	0,08	0,07	100,00
Kab. Banjarnegara	99,48	0,40	0,12	100,00
Kab. Kebumen	99,66	0,00	0,34	100,00
Kab. Purworejo	99,83	0,17	0,00	100,00
Kab. Wonosobo	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Magelang	99,81	0,00	0,19	100,00
Kab. Boyolali	99,72	0,28	0,00	100,00
Kab. Klaten	99,49	0,51	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Wonogiri	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Karanganyar	99,81	0,19	0,00	100,00
Kab. Sragen	99,76	0,24	0,00	100,00
Kab. Grobogan	99,91	0,09	0,00	100,00
Kab. Bora	99,97	0,00	0,03	100,00
Kab. Rembang	99,83	0,17	0,00	100,00
Kab. Pati	99,91	0,09	0,00	100,00
Kab. Kudus	99,73	0,27	0,00	100,00
Kab. Jepara	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Demak	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Semarang	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Temanggung	99,74	0,26	0,00	100,00
Kab. Kendal	99,91	0,09	0,00	100,00
Kab. Batang	99,45	0,00	0,55	100,00
Kab. Pekalongan	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Pemasang	99,87	0,13	0,00	100,00
Kab. Tegal	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Brebes	99,85	0,00	0,15	100,00
Kota Magelang	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Surakarta	99,89	0,11	0,00	100,00
Kota Salatiga	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Semarang	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Pekalongan	99,83	0,00	0,17	100,00
Kota Tegal	99,87	0,00	0,13	100,00
Jawa Tengah	99,85	0,10	0,05	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan serta Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Sendiri	Bersama	MCK Komunal/Umum
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	86,44	5,82	0,74
Kab. Banyumas	77,30	11,22	0,76
Kab. Purbalingga	87,57	5,27	0,00
Kab. Banjarnegara	77,93	3,71	2,27
Kab. Kebumen	88,05	8,92	0,76
Kab. Purworejo	88,07	9,62	0,37
Kab. Wonosobo	86,30	6,24	6,66
Kab. Magelang	81,28	8,30	2,39
Kab. Boyolali	84,31	12,10	0,05
Kab. Klaten	76,63	20,03	0,08
Kab. Sukoharjo	84,39	12,78	1,18
Kab. Wonogiri	95,83	3,08	0,00
Kab. Karanganyar	93,81	4,69	0,10
Kab. Sragen	90,27	7,73	0,50
Kab. Grobogan	86,29	7,93	0,25
Kab. Blora	86,73	9,84	0,00
Kab. Rembang	90,85	3,96	0,25
Kab. Pati	90,62	5,66	0,30
Kab. Kudus	91,95	6,08	0,00
Kab. Jepara	82,01	12,14	1,31
Kab. Demak	86,84	8,32	0,00
Kab. Semarang	91,63	6,13	1,20
Kab. Temanggung	87,92	4,38	4,17
Kab. Kendal	88,34	4,11	0,00
Kab. Batang	87,36	3,00	0,62
Kab. Pekalongan	82,69	8,09	0,98
Kab. Pemalang	78,54	9,45	0,74
Kab. Tegal	82,15	14,48	0,18
Kab. Brebes	77,65	8,93	0,10
Kota Magelang	88,19	9,01	2,06
Kota Surakarta	74,37	18,47	7,16
Kota Salatiga	83,73	15,91	0,36
Kota Semarang	85,03	12,80	2,15
Kota Pekalongan	85,87	9,06	4,64
Kota Tegal	68,20	29,39	0,34
Jawa Tengah	84,91	9,02	1,01

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 4.5 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Tidak Digunakan	Tidak ada fasilitas	Jumlah
(1)	(5)	(6)	(7)
Kab. Cilacap	0,14	6,86	100,00
Kab. Banyumas	0,00	10,72	100,00
Kab. Purbalingga	0,13	7,03	100,00
Kab. Banjarnegara	0,00	16,09	100,00
Kab. Kebumen	0,00	2,27	100,00
Kab. Purworejo	0,00	1,94	100,00
Kab. Wonosobo	0,18	0,62	100,00
Kab. Magelang	0,00	8,03	100,00
Kab. Boyolali	0,00	3,54	100,00
Kab. Klaten	0,00	3,26	100,00
Kab. Sukoharjo	0,00	1,65	100,00
Kab. Wonogiri	0,00	1,09	100,00
Kab. Karanganyar	0,00	1,40	100,00
Kab. Sragen	0,12	1,38	100,00
Kab. Grobogan	0,15	5,38	100,00
Kab. Blora	0,00	3,43	100,00
Kab. Rembang	0,00	4,94	100,00
Kab. Pati	0,07	3,35	100,00
Kab. Kudus	0,36	1,61	100,00
Kab. Jepara	0,00	4,54	100,00
Kab. Demak	0,00	4,84	100,00
Kab. Semarang	0,00	1,04	100,00
Kab. Temanggung	0,00	3,53	100,00
Kab. Kendal	0,00	7,55	100,00
Kab. Batang	0,20	8,82	100,00
Kab. Pekalongan	0,19	8,05	100,00
Kab. Pemalang	0,20	11,07	100,00
Kab. Tegal	0,11	3,08	100,00
Kab. Brebes	0,29	13,03	100,00
Kota Magelang	0,00	0,74	100,00
Kota Surakarta	0,00	0,00	100,00
Kota Salatiga	0,00	0,00	100,00
Kota Semarang	0,00	0,02	100,00
Kota Pekalongan	0,00	0,43	100,00
Kota Tegal	0,14	1,93	100,00
Jawa Tengah	0,07	4,99	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 4.6 Persentase Rumah Tangga*¹⁾ yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset			Jumlah
	Leher angsa	Plengsengan	Cemplung/ cubluk	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kab. Cilacap	95,40	1,08	3,52	100,00
Kab. Banyumas	97,75	0,54	1,71	100,00
Kab. Purbalingga	98,54	0,93	0,53	100,00
Kab. Banjarnegara	93,58	3,78	2,64	100,00
Kab. Kebumen	98,82	0,38	0,80	100,00
Kab. Purworejo	94,96	0,69	4,35	100,00
Kab. Wonosobo	86,13	9,60	4,27	100,00
Kab. Magelang	95,41	3,56	1,03	100,00
Kab. Boyolali	98,14	0,00	1,86	100,00
Kab. Klaten	99,57	0,07	0,36	100,00
Kab. Sukoharjo	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Wonogiri	96,90	0,72	2,38	100,00
Kab. Karanganyar	99,78	0,22	0,00	100,00
Kab. Sragen	96,44	0,23	3,33	100,00
Kab. Grobogan	93,57	3,72	2,71	100,00
Kab. Blora	91,89	0,74	7,37	100,00
Kab. Rembang	98,55	0,13	1,32	100,00
Kab. Pati	97,73	0,52	1,75	100,00
Kab. Kudus	99,61	0,22	0,17	100,00
Kab. Jepara	94,02	0,12	5,86	100,00
Kab. Demak	98,99	0,51	0,50	100,00
Kab. Semarang	99,23	0,30	0,47	100,00
Kab. Temanggung	96,69	2,50	0,81	100,00
Kab. Kendal	98,26	1,65	0,09	100,00
Kab. Batang	98,75	1,11	0,14	100,00
Kab. Pekalongan	97,52	2,48	0,00	100,00
Kab. Pemalang	97,43	0,92	1,65	100,00
Kab. Tegal	98,51	0,83	0,66	100,00
Kab. Brebes	97,31	0,68	2,01	100,00
Kota Magelang	99,78	0,22	0,00	100,00
Kota Surakarta	98,81	1,19	0,00	100,00
Kota Salatiga	99,84	0,00	0,16	100,00
Kota Semarang	97,99	1,78	0,23	100,00
Kota Pekalongan	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Tegal	99,32	0,12	0,56	100,00
Jawa Tengah	97,09	1,22	1,69	100,00

Catatan: *) Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan penggunaan sendiri atau bersama

Tabel 4.7 Persentase Rumah Tangga*¹ Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Tangki septik	IPAL	Kolam/sawah/ sungai/danau/ laut	Lubang tanah	Pantai/ tanah lapang/ kebun/ Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Cilacap	86,03	0,15	9,85	3,89	0,08	100,00
Kab. Banyumas	83,80	1,14	13,88	1,08	0,10	100,00
Kab. Purbalingga	83,25	1,27	10,92	4,56	0,00	100,00
Kab. Banjarnegara	35,82	1,75	31,12	31,31	0,00	100,00
Kab. Kebumen	91,75	0,00	3,60	4,44	0,21	100,00
Kab. Purworejo	83,35	1,76	13,50	1,39	0,00	100,00
Kab. Wonosobo	18,84	0,00	38,81	42,35	0,00	100,00
Kab. Magelang	77,46	1,40	11,82	9,32	0,00	100,00
Kab. Boyolali	89,92	0,45	0,79	8,77	0,07	100,00
Kab. Klaten	97,57	0,32	1,61	0,50	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	98,55	0,48	0,83	0,14	0,00	100,00
Kab. Wonogiri	92,67	0,22	0,00	7,11	0,00	100,00
Kab. Karanganyar	97,54	0,86	1,54	0,06	0,00	100,00
Kab. Sragen	94,39	0,65	1,06	3,90	0,00	100,00
Kab. Grobogan	93,30	0,00	1,05	5,55	0,10	100,00
Kab. Blora	89,42	0,77	1,88	7,49	0,44	100,00
Kab. Rembang	97,32	0,29	0,63	1,76	0,00	100,00
Kab. Pati	94,27	0,00	1,16	4,24	0,33	100,00
Kab. Kudus	89,07	0,19	5,10	5,64	0,00	100,00
Kab. Jepara	48,37	0,81	0,99	49,71	0,12	100,00
Kab. Demak	95,92	0,00	2,80	1,28	0,00	100,00
Kab. Semarang	77,73	1,32	3,93	16,96	0,06	100,00
Kab. Temanggung	58,82	2,64	20,53	18,01	0,00	100,00
Kab. Kendal	92,12	0,00	6,29	1,59	0,00	100,00
Kab. Batang	43,17	0,56	15,37	40,61	0,29	100,00
Kab. Pekalongan	85,90	0,95	10,35	2,80	0,00	100,00
Kab. Pemalang	81,46	0,14	9,35	9,05	0,00	100,00
Kab. Tegal	83,18	0,00	12,37	4,45	0,00	100,00
Kab. Brebes	85,60	0,00	14,18	0,22	0,00	100,00
Kota Magelang	81,82	6,52	11,66	0,00	0,00	100,00
Kota Surakarta	82,51	15,03	2,46	0,00	0,00	100,00
Kota Salatiga	94,14	0,60	4,32	0,94	0,00	100,00
Kota Semarang	96,67	1,14	0,68	1,44	0,07	100,00
Kota Pekalongan	90,72	2,49	5,74	0,93	0,12	100,00
Kota Tegal	93,09	0,00	6,80	0,11	0,00	100,00
Jawa Tengah	83,59	0,86	7,36	8,13	0,06	100,00

Catatan: *) Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan penggunaan sendiri atau bersama

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Daerah Tempat Tinggal, Sumber Air Minum Bersih, Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih	Akses Air Minum Layak	Akses Sanitasi Layak
(1)	(2)	(3)	(5)
Kab. Cilacap	77,38	93,02	80,85
Kab. Banyumas	76,67	92,80	75,24
Kab. Purbalingga	74,76	94,51	81,24
Kab. Banjarnegara	73,21	85,54	46,25
Kab. Kebumen	64,50	88,16	91,95
Kab. Purworejo	71,89	86,82	83,79
Kab. Wonosobo	93,70	97,74	48,18
Kab. Magelang	79,35	90,51	76,91
Kab. Boyolali	74,26	95,08	92,85
Kab. Klaten	64,40	97,83	94,68
Kab. Sukoharjo	81,29	99,27	96,64
Kab. Wonogiri	87,33	96,84	94,74
Kab. Karanganyar	87,37	98,53	96,70
Kab. Sragen	91,01	98,15	93,27
Kab. Grobogan	90,34	81,60	87,39
Kab. Blora	90,75	92,41	87,46
Kab. Rembang	85,66	96,57	92,68
Kab. Pati	82,60	94,97	92,17
Kab. Kudus	82,50	98,32	91,81
Kab. Jepara	73,89	83,61	63,67
Kab. Demak	87,61	96,30	91,54
Kab. Semarang	86,01	98,22	89,53
Kab. Temanggung	80,91	92,81	68,99
Kab. Kendal	85,91	95,78	85,37
Kab. Batang	75,47	98,09	67,91
Kab. Pekalongan	73,19	97,14	76,85
Kab. Pemalang	74,54	92,85	77,64
Kab. Tegal	74,87	96,80	81,52
Kab. Brebes	75,85	93,17	73,81
Kota Magelang	93,33	100,00	85,87
Kota Surakarta	86,15	99,40	90,03
Kota Salatiga	91,96	99,12	94,61
Kota Semarang	95,09	98,90	93,96
Kota Pekalongan	77,30	99,90	88,49
Kota Tegal	99,84	99,89	91,19
Jawa Tengah	80,64	94,07	83,24

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama yang Digunakan untuk Memasak, Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kabupaten/Kota	Listrik	Gas Elpiji	Gas kota/ Biogas	Minyak tanah	Arang/ Briket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Cilacap	0,96	86,91	0,00	0,00	0,00
Kab. Banyumas	0,00	87,01	0,00	0,13	0,00
Kab. Purbalingga	0,00	87,80	0,00	0,05	0,00
Kab. Banjarnegara	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00
Kab. Kebumen	0,40	80,63	0,00	0,00	0,00
Kab. Purworejo	0,00	70,37	0,00	0,16	0,08
Kab. Wonosobo	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00
Kab. Magelang	0,43	66,77	0,00	0,00	0,21
Kab. Boyolali	0,28	84,62	0,00	0,21	0,00
Kab. Klaten	1,13	88,07	0,00	0,22	0,11
Kab. Sukoharjo	0,41	92,01	0,00	0,21	0,00
Kab. Wonogiri	0,74	67,33	0,00	0,14	0,08
Kab. Karanganyar	1,32	88,87	0,00	0,11	0,00
Kab. Sragen	0,62	84,41	0,00	0,00	0,00
Kab. Grobogan	1,45	86,13	0,00	0,00	0,00
Kab. Blora	0,51	80,09	0,53	0,00	0,14
Kab. Rembang	0,97	83,98	0,00	0,00	0,00
Kab. Pati	0,73	89,74	0,00	0,00	0,00
Kab. Kudus	0,81	94,88	0,00	0,15	0,00
Kab. Jepara	0,63	88,89	0,00	0,00	0,00
Kab. Demak	0,69	94,78	0,00	0,16	0,00
Kab. Semarang	1,16	86,13	0,00	0,00	0,00
Kab. Temanggung	0,24	70,52	0,16	0,00	0,00
Kab. Kendal	1,17	86,63	0,00	0,25	0,00
Kab. Batang	0,07	80,38	0,00	0,00	0,00
Kab. Pekalongan	0,26	89,46	0,00	0,14	0,00
Kab. Pemalang	0,68	89,54	0,00	0,00	0,00
Kab. Tegal	0,00	95,01	0,00	0,21	0,00
Kab. Brebes	0,32	91,37	0,00	0,00	0,00
Kota Magelang	1,79	90,71	0,00	0,60	0,95
Kota Surakarta	3,32	85,62	0,00	0,73	0,47
Kota Salatiga	0,62	87,59	0,00	0,09	0,22
Kota Semarang	0,15	95,05	1,74	0,14	0,22
Kota Pekalongan	0,87	95,70	0,00	0,73	0,00
Kota Tegal	0,29	98,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Tengah	0,60	85,52	0,11	0,09	0,04

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 5.2 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Kayu bakar	Lainnya	Tidak memasak di rumah	Jumlah
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Cilacap	11,51	0,00	0,62	100,00
Kab. Banyumas	10,58	0,00	2,28	100,00
Kab. Purbalingga	10,69	0,10	1,36	100,00
Kab. Banjarnegara	23,10	0,00	0,17	100,00
Kab. Kebumen	17,41	0,20	1,36	100,00
Kab. Purworejo	28,09	0,00	1,30	100,00
Kab. Wonosobo	32,69	1,06	0,00	100,00
Kab. Magelang	32,41	0,00	0,18	100,00
Kab. Boyolali	14,19	0,00	0,70	100,00
Kab. Klaten	8,38	0,00	2,09	100,00
Kab. Sukoharjo	4,65	0,00	2,72	100,00
Kab. Wonogiri	30,80	0,08	0,83	100,00
Kab. Karanganyar	8,29	0,14	1,27	100,00
Kab. Sragen	14,43	0,00	0,54	100,00
Kab. Grobogan	11,87	0,00	0,55	100,00
Kab. Blora	17,77	0,00	0,96	100,00
Kab. Rembang	13,72	0,00	1,33	100,00
Kab. Pati	8,87	0,00	0,66	100,00
Kab. Kudus	2,65	0,00	1,51	100,00
Kab. Jepara	8,85	0,21	1,42	100,00
Kab. Demak	3,68	0,00	0,69	100,00
Kab. Semarang	11,84	0,00	0,87	100,00
Kab. Temanggung	28,62	0,00	0,46	100,00
Kab. Kendal	10,45	0,00	1,50	100,00
Kab. Batang	18,99	0,00	0,56	100,00
Kab. Pekalongan	8,58	0,00	1,56	100,00
Kab. Pemasang	9,13	0,00	0,65	100,00
Kab. Tegal	4,42	0,00	0,36	100,00
Kab. Brebes	8,12	0,00	0,19	100,00
Kota Magelang	1,91	0,00	4,04	100,00
Kota Surakarta	0,83	0,00	9,03	100,00
Kota Salatiga	2,92	0,22	8,34	100,00
Kota Semarang	0,38	0,00	2,32	100,00
Kota Pekalongan	0,92	0,00	1,78	100,00
Kota Tegal	1,23	0,00	0,48	100,00
Jawa Tengah	12,35	0,05	1,24	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

CATATAN ESTIMASI SAMPLING ERROR

Estimasi dari sampel survei dipengaruhi oleh dua jenis error (kesalahan) yaitu *sampling error* dan *non sampling error* (seperti kesalahan dalam wawancara dan kesalahan pengolaan). *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* dari suatu angka estimasi persentase suatu variable yang disajikan dari hasil Susenas 2020.

Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variable, yang dinyatakan dalam persentase (%). Dengan menggunakan selang kepercayaan 95 persen, dapat disajikan estimasi interval (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error*.

Penghitungan *sampling error* pada variable Susenas Maret 2020 menggunakan *software* SPSS versi 20, variable yang dihitung *sampling error*-nya terbatas seperti tersaji pada tabel 6.

<https://jateng.bps.go.id>

Tabel 6 **Sampling Error Profil Tempat Tinggal Hasil Survei Sosial
Ekonomi Nasional Maret 2020**

Varibel	Estimasi	Standart Error	Relative Standart Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sampling Error persentase Rumahtangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020					
- Milik sendiri	89,19	0,28	0,32	88,64	89,75
- Kontrak/sewa	2,56	0,13	5,37	2,29	2,83
- Bebas Sewa	8,09	0,24	3,00	7,62	8,57
Sampling Error persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020					
- Beton	1,02	0,07	7,64	0,87	1,18
- Genteng	86,96	0,39	0,46	86,18	87,74
- Seng	6,78	0,30	4,49	6,18	7,37
- Asbes	5,04	0,23	4,74	4,57	5,51
Sampling Error persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020					
- Tembok	82,96	0,35	0,43	82,27	83,65
- Kayu/papan	14,35	0,33	2,27	13,71	14,99
- Anyaman bambu	1,45	0,09	6,86	1,25	1,65
- Bambu	0,12	0,02	20,22	0,07	0,17

Tabel 6 (Lanjutan)

Varibel	Estimasi	Standart Error	Relative Standart Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sampling Error persentase Rumah tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2020					
- Marmmer	1,79	0,11	6,09	1,57	2,00
- Keramik	56,28	0,41	0,74	55,46	57,10
- Parket/Vinil/karpet	0,26	0,03	14,11	0,19	0,34
- Ubin/tegel/teraso	9,16	0,26	2,88	8,65	9,68
- Kayu/papan	1,14	0,12	11,04	0,89	1,38
- Semen/bata merah	21,20	0,36	1,71	20,49	21,91
- Bambu	0,14	0,02	19,94	0,08	0,19
- Tanah	9,87	0,26	0,02	9,36	10,39
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, Provinsi Jawa Tengah, 2020					
- Sumur Tak Terlindung	2,06	0,18	8,74	1,71	2,42
- Mata Air Tak Terlindung	2,15	0,22	10,46	1,71	2,59
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Provinsi Jawa Tengah, 2020					
- Tangki Septik	83,59	0,56	0,67	82,50	84,69
- IPAL	0,86	0,11	13,00	0,64	1,08
- Pantai/tanah lapang/kebun/lainnya	0,06	0,02	34,27	0,02	0,11
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak menurut Provinsi Jawa Tengah, 2020	94,07	0,35	0,37	93,38	94,75

Sumber: Susenas Maret 2020

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Indonesia: Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No.7. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.1999. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Sekretariat Kabinet RI.Jakarta

_____. (2017). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/- Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/11/3.-PilarPembangunan-Lingkungan-1.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018.

_____. (2017). Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Goal-1.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018.

_____. (2017). Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/11/Goal-6.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018.

_____. (2017). Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/11/Goal-11.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018

www.flaticon.com

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : bps3300@bps.go.id

